

**MODEL KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
PENGEMBANGAN MODAL SOSIAL INDUSTRI
KECIL BATIK DI ERA MEA**

Dr. Ir. Herrukmi Septa Rinawati, MM



**Model Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Modal
Sosial Industri Kecil Batik Di Era MEA**

Penulis

Dr. Ir. Herrukmi Septa Rinawati, MM

Editor

Dr. Jonaedi Efendi, S.H., M.H.

Desain Cover

Bichiz Daz

Layout

Fitri Ana Rahmayani, S. Hum

Copyright © 2019 Jakad Media Publishing
Surabaya

Diterbitkan & Dicitak Oleh

CV. Jakad Media Publishing Surabaya 2019

Jl. Gayung Kebon Sari I No. 1 Surabaya

Telp. : 081234408577

E-mail : jakadmedia@gmail.com

ISBN: 978-623-7033-19-6

E-ISBN: 978-623-7033-20-2

**Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang
Ketentuan Pidana Pasal 112 - 119
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta.**

**Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya, buku tentang Model Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Modal Sosial Industri Kecil Batik di Era MEA telah dapat diselesaikan. Tujuan dari disusunnya buku ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengembangan industri kecil batik di era Masyarakat Ekonomi Asia (MEA).

Perkembangan teknologi informasi akhir-akhir ini membawa perubahan yang mendasar pada struktur ekonomi. Pemasaran produk industri kecil meluas antar negara hingga ke tingkat antar individu. Adanya kesepakatan antar pemerintah dalam satu regional tertentu seperti Masyarakat Ekonomi Asia (MEA), menyebabkan Indonesia tidak bisa membendung masuknya barang dari negara lain. Demikian juga sebaliknya, Indonesia menjadi lebih bebas mengeksport barang dan jasa ke negara-negara anggota ASEAN.

Batik merupakan salah satu produk kerajinan yang telah ditetapkan sebagai salah satu warisan dunia oleh Unesco sejak 2 Oktober 2009. Namun demikian kain bercorak batik dan produk batik jadi dari China membanjiri pasar Indonesia. Dalam menghadapi serbuan produk dari luar negeri ternyata para pengusaha industri kecil telah menunjukkan perkembangan yang berarti dalam hal kreativitas. Hal ini ditunjang dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembinaan industri kecil khususnya industri kecil batik di kabupaten Bojonegoro dan industri kecil pakaian jadi dan batik di kabupaten Tulungagung. Pembinaan yang dilakukan tidak hanya memajukan secara kasat mata, tetapi juga yang tidak kasat mata yaitu berupa modal sosial.

Kami mengucapkan terima kasih anggota peneliti dan beberapa pihak yang telah memberikan bantuan sehingga tersusunnya buku ini. Kepada bapak Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan kesempatan

kepada kami untuk melaksanakan penelitian dan kepada teman-teman sejawat atas dukungannya.

Surabaya, 15 Februari 2019

Penyusun

Dr. Ir. Herrukmi Septa Rinawati, MM
081336740745, septa27@yahoo.com

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Metodologi	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Industri Kecil.....	9
B. Modal Sosial.....	12
C. Masyarakat Ekonomi Asia (MEA).....	15
BAB III : KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN MODAL SOSIAL INDUSTRI KECIL	19
A. Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	19
1. Kabupaten Bojonegoro: Mendulang dari Kemurahan Alam	19
2. Kabupaten Tulungagung: Dari lereng Gunung Wilis, mendulang rezeki dari Peg. Kendeng Selatan	31
B. Karakteristik Responden.....	42
1. Jenis Kelamin, Usia dan Status Kawin	42
2. Tingkat Pendidikan.....	45
3. Jenis Pekerjaan.....	46
4. Pendapatan Keluarga.....	49
C. Profil Usaha	49
1. Jenis Usaha dan Lama Usaha	49
2. Asal Modal dan Tenaga Kerja.....	51
3. Pemasaran dan Omzet Penjualan	54

D. Keterlibatan Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah dalam Modal Sosial Usaha Kecil.....	61
1. Kebijakan Pemerintah terhadap Industri Kecil	61
2. Bantuan Permodalan hingga Pemasaran sebagai Penguatan Modal Sosial	64
BAB IV : MODAL SOSIAL PENGUSAHA INDUSTRI KECIL DI JAWA TIMUR DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN DI ERA MEA.....	69
A. Modal Sosial Industri Kecil.....	69
1. Organisasi Kemasyarakatan Lokal	69
2. Intensitas Hubungan Sosial.....	75
3. Ikatan Sosial dan Reabilitas	78
4. Rasa Aman.....	82
5. Partisipasi Politik	84
BAB V: HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PENGEMBANGAN MODAL SOSIAL.....	87
BAB VI: MODEL KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK PENGEMBANGAN MODAL SOSIAL	89
A. Membangun Peta Jalan (Road Map) Penguatan Modal Sosial Usaha Kecil.....	89
BAB VII: PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Rekomendasi	97
DAFTAR PUSTAKA	99
TENTANG PENULIS.....	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Bentuk dan Ruang Lingkup Modal Sosial.....	13
Gambar 3.1 Peta Kabupaten Bojonegoro.....	20
Gambar 3.2 Motif Gatra Rinonce	28
Gambar 3.3 Motif Mijil Mas.....	31
Gambar 3.4 Peta Topografi Kabupaten Tulungagung	34
Gambar 3.5 Usia Responden.....	43
Gambar 3.6 Tingkat Pendidikan Responden.....	44
Gambar 3.7 Jenis Pekerjaan Responden	45
Gambar 3.8 Pendapatan Keluarga.....	48
Gambar 3.9 Produk Industri Kecil Responden	50
Gambar 3.10 Asal Tenaga Kerja.....	52
Gambar 3.11 Sistem Pengupahan	53
Gambar 3.12 Wilayah Pemasaran.....	55
Gambar 3.13 Tenaga Pemasaran.....	57
Gambar 3.14 Blog Pengusaha Batik Bojonegoro tentang Produknya	58
Gambar 3.15 Salah Satu Konveksi yang menggunakan Jasa Online	59
Gambar 3.16 Besaran Omzet Bersih tiap bulannya	61
Gambar 6.1 Road-Map Pengembangan Industri Kecil	92

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 PDRB Menurut Lapangan Pekerjaan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012-2016.....	24
Tabel 3.2 Lapangan Usaha dan Jumlah Perusahaan Kab. Bojonegoro dalam tahun 2016/2017	27
Tabel 3.3 Pengrajin Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Kabupaten Bojonegoro	29
Tabel 3.4 PDRB Menurut Lapangan Pekerjaan Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2016	36
Tabel 3.5 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang bekerja seminggu yang lalu menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2015	36
Tabel 3.6 Industri Kecil/Kerajinan Rumah Tangga (IKKR) Dan Industri Besar/menurut Jenis Industri dan Unit serta Tenaga Kerja, 2009-2015	37
Tabel 3.7 Industri Kecil/Kerajinan Rumah Tangga menurut Kecamatan dan Jenisnya, 2009-2015	40
Tabel 3.8 Sentra Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Kabupaten Tulungagung	42
Tabel 3.9 Asal Perolehan Modal Ekonomi Industri Kecil milik Responden.....	51
Tabel 3.10 Keterlibatan Pihak lain dalam Pengembangan Industri Kecil Responden	65
Tabel 4.1 Jumlah Organisasi dan Status Keanggotaan	71
Tabel 4.2 Penghimpunan Dana dalam Organisasi Masyarakat Lokal.....	73
Tabel 4.3 Intensitas Hubungan Sosial.....	77
Tabel 4.4 Ikatan Sosial dan Reprositas	78
Tabel 4.5 Tindakan pada saat Kejadian	83
Tabel 4.6 Partisipasi Politik	85
Tabel 6.1 Matriks Korelasi antara Omzet dan Modal Sosial	90
Tabel 6.2 Analisis Anova Perbedaan Omzet berdasarkan Keanggotaan Organisasi.....	91

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ada perubahan struktur ekonomi menjelang akhir abad ke-20 dan memasuki abad ke-21. Pertama, pasar meluas dan melintasi negara hingga ke tingkat antar individu karena teknologi informatika yang memungkinkan kontak antar individu lebih mudah. Kedua, produsen memiliki kemudahan memasarkan dengan minimalisasi harga jual karena pembebasan bea masuk. Hal itu tidak terlepas dari sejumlah kesepakatan antar pemerintah dalam satu regional tertentu, seperti Masyarakat Ekonomi Asia (MEA). Ketiga, perubahan penguasaan pemilikan modal yang melintasi batas-batas negara. Artinya, dalam *multinational corporation* (MNC), pemilik modal dari negara asing mendirikan pabrik dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia negara setempat, sekaligus menjadikan sebagai pasar. Keuntungan terbesar pada pemilik modal tersebut. Terakhir, produk tidak lagi dalam berupa barang dan saham, tetapi juga mata uang. Akibatnya, nilai tukar mata uang sangat rentan, bergantung pada permintaan dan penawaran. Kerentanan ini berpengaruh pada harga bahan baku dan harga jual produk.

Dalam sejarahnya, Indonesia sebenarnya telah memiliki strategi mengatasi kondisi yang demikian. Pada awal abad ke-20, semasa pemerintah kolonial Belanda sejumlah pedagang di Solo membangun ikatan solidaritas yang kuat mengatasi persaingan dagang dari etnis Cina dan Timur Asing dengan mendirikan Serikat Dagang Islam. Sejumlah industri *boemi poetera*, seperti: pabrik rokok dibangun dengan jaringan dan ikatan tersebut. Contoh serupa ditunjukkan pada sejumlah jaringan perdagangan yang

dibangun berbasis etnis di dunia, seperti: jaringan Cina Perantauan yang menguasai jaringan perdagangan Asia dan merambah ke Eropa dan Amerika, demikian pula dengan jaringan pedagang Gujarati yang menguasai 50% pangsa pasar intan di dunia.

Pada masa sekarang perkumpulan pengusaha dan pedagang di daerah khususnya pengusaha industri kecil dalam bentuk sentra industri kecil telah dikembangkan di bawah bimbingan Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, serta ins-tansi terkait lainnya. Perkumpulan ini berguna bagi para anggota-nya dalam hal distribusi informasi tentang manajemen penge-lolaan usaha, teknologi produksi dan pemasaran terutama dalam menghadapi persaingan di era MEA. Indonesia harus mening-kan daya saing produk industri dan jasa. Indonesia masih harus mengembangkan industri yang berbasis nilai tambah. Oleh karena itu Indonesia perlu kerja keras melakukan hilirisasi produk dengan melakukan pengolahan hasil produksi primer. Dari sisi hulu, Indonesia sudah menjadi produsen yang dapat diandalkan mulai dari pertanian, kelautan dan perkebunan. Tetapi semua produk tersebut belum sampai ke hilir untuk mengurangi impor barang jadi, sebab Indonesia telah memiliki bahan baku yang cukup. Usaha lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk kluster untuk pembinaan IKM agar memiliki daya saing.

Pelaksanaan ACFTA dan MEA berdampak pada penurunan biaya tarif ekspor-impor menjadi 0-5 persen serta penghapusan batasan kuantitatif dan hambatan non tarif lainnya. Dibukanya ruang-ruang perdagangan bebas di kawasan ASEAN diprediksi mampu mendorong hal positif bagi pembangunan ekonomi Indonesia, *pertama*, mendorong pendapatan negara menalalui ekspor dan impor. *Kedua*, membuka peluang industrialisasi baru

di kawasan Indonesia yang sempat lesu karena krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. *Ketiga*, memperluas lapangan kerja profesional bagi ledakan generasi-generasi muda baru di Indonesia serta memberikan kesempatan berkarir di berbagai wilayah di ASEAN. Namun pada saat yang bersamaan, kekhawatiran terhadap ekonomi pasar juga menjadi momok yang menakutkan bagi para pengusaha Indonesia, ditengah lemahnya daya saing industri lokal, lemahnya proteksi negara terhadap industri-industri lokal ditakutkan mampu menggerus potensi pengusaha lokal dan beberapa Usaha Kecil Menengah (UKM) yang masih kekurangan dalam berbagai aspek ekonomi. Selain itu secara ekonomi, Indonesia tidak lebih baik dari Singapura, Malaysia, Thailand dan Kamboja. Namun kegagalan ekonomi pasar lama telah membuka pasar bebas dalam cara pandang baru ekonomi pasar yang di-bangun diatas otorisasi negara.

Indonesia menjadi lebih bebas mengeksport barang dan jasa ke negara-negara anggota ASEAN. Demikian juga sebaliknya, barang dan jasa dari negara-negara anggota ASEAN lebih bebas masuk ke Indonesia. Tujuan dibentuknya MEA adalah untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN. MEA sebagai peluang namun juga tantangan untuk Indonesia. Sektor-sektor yang akan menjadi unggulan Indonesia dalam MEA 2015 adalah Sumber Daya Alam (SDA), Informasi Teknologi, dan Ekonomi Kreatif. Ketiga sektor ini merupakan sektor terkuat Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lain. Menurut Direktur Eksekutif *Center of Reform on Economics* (CORE) Hendri Saporini, kesiapan Indonesia dalam menghadapi MEA 2015 baru mencapai 82 persen. Hal itu ditengarai dari empat (4) isu penting yang perlu segera diantisipasi pemerintah dalam menghadapi MEA 2015, yaitu: 1) Indo-

nesia berpotensi sekedar pemasok energi dan bahan baku bagi industrilisasi di kawasan ASEAN, sehingga manfaat yang diperoleh dari kekayaan neraca perdagangan barang Indonesia yang saat ini paling besar di antara negara-negara ASEAN semakin bertambah, 2) melebarkan deficit perdagangan barang, 3) membebaskan aliran tenaga kerja sehingga Indonesia harus mengantisipasi dengan menyiapkan strategi karena potensi membanjirnya Tenaga Kerja Asing (TKA), dan 4) masuknya investasi ke Indonesia dari dalam dan luar ASEAN. Dengan demikian di-dalam perdagangan bebas akan ada hal positif dan negatif yang akan dialami setiap negara yang terlibat didalamnya. Tantangan bagi Indonesia kedepan adalah mewujudkan perubahan bagi masyarakatnya agar siap menghadapi perdagangan bebas di maksud (Wangke, 2014)

Sejak diakuinya batik Indonesia sebagai salah satu warisan budaya oleh UNESCO pada 02 Oktober 2009, batik yang awalnya identik sebagai 'baju kondangan' mulai beralih menjadi kain yang bisa disulap menjadi produk fashion yang bernilai tinggi sehingga permintaan batik di pasar pun mulai meningkat. Hampir di semua daerah di Indonesia, termasuk di Jawa Timur, batik khas daerah telah dikembangkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Di sisi lain, mulai tahun 2012, Indonesia mengimpor kain batik dan produk batik jadi dari China dengan nilai 30 juta dollar AS atau senilai dengan Rp 285 M. Ironis, padahal batik identik dengan karya Indonesia. Bahkan menurut Ketua Asosiasi Per-teksilan Indonesia (API) Ade Sudrajat, serbuan barang tekstil, khususnya batik dari China, sudah terjadi sejak 4 tahun yang lalu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat sebanyak 1.037 ton produk batik yang masuk dari China ke Indonesia dengan nilai 30 juta dolar AS. Batik impor dari China

ini adalah batik-batik yang tergolong murah, sehingga sangat digemari oleh masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah.

Selain jenis kain batik, produk dari Cina yang menyerbu ke pasar lokal ada beberapa bentuk barang jadi lainnya seperti jaket, blazer, celana, baju untuk perempuan dan laki-laki, serta sapu tangan, syal, scarf, dan dasi dari proses batik. Hal ini mengakibatkan produk tekstil di dalam negeri semakin terpuruk karena pasar Indonesia semakin tergerus oleh barang impor. Baju impor yang banyak berasal dari negara China paling mendominasi bahkan sampai akhir februari 2013 komposisi baju impor China mencapai 60% dari keseluruhan stock baju yang dijual di Tanah Abang, Jakarta. Membludaknya baju impor yang berasal dari China dan Korea tidak terlepas dari kebijakan ASEAN-China Free Trade Agreement tahun 2010 dimana bea cukai yang dikenakan untuk produk impor bisa berkurang dengan signifikan.

Oleh karena itu di era MEA ini, modal sosial sangat dibutuhkan oleh pengusaha IKM dalam menghadapi serbuan barang dan jasa dari Negara-negara anggota ASEAN. Pemerintah telah mengadakan pembinaan sehingga modal sosial yang telah ada menjadi semakin kuat. Modal sosial adalah modal yang dimiliki masyarakat, termasuk di kalangan pengusaha IKM dengan berorganisasi sosial atau melakukan interaksi kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat serta menggunakannya sebagai proses kegiatan usaha sehingga potensi modal sosial menjadi modal sosial yang nyata bagi kegiatan usaha. Modal sosial seseorang dapat tumbuh antara lain adalah karena adanya interaksi pada organisasi sosial, karena salah satu fungsi organisasi adalah suatu wadah atau tempat menyalurkan partisipasi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Modal Sosial Industri Kecil?
2. Bagaimana perkembangan modal sosial pengusaha industri kecil di Jawa Timur dalam menghadapi persaingan di era MEA?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pengembangan modal sosial pengusaha industri kecil dalam menghadapi persaingan di era MEA?
4. Bagaimana model kebijakan dapat dilaksanakan pemerintah daerah untuk pengembangan modal sosial pengusaha industri kecil dalam menghadapi persaingan di era MEA?

C. Metodologi

1. Pendekatan

Pendekatan pengembangan ini menggunakan pendekatan campuran (mix method) kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan. Pendekatan ini diawali dengan melakukan survai pada sejumlah pengartjin industri mikro di kedua kabupaten. Untuk memperdalamnya, tim peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu: FGD. Apa yang dipikirkan dan dialami oleh pengusaha industri kecil mikro terekam. Dari data-data ini, tim peneliti mengembangkan model yang dapat diterapkan dalam kondisi yang sesuai.

2. Penentuan Lokasi dan Jangka Waktu

Kegiatan pengembangan yang diperkirakan berlangsung selama dua belas bulan yaitu mulai bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017, dengan lokasi Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tulung Agung berdasar beberapa alasan yaitu:

(1) Kabupaten Bojonegoro merupakan sentra yang mempunyai jumlah industri kecil yang cukup banyak khususnya pengrajin mebel dan batik, (2) Kabupaten Tulungagung merupakan sentra yang mempunyai jumlah industri mikro yang relatif banyak khususnya pengrajin batik dan pakaian jadi

3. Teknik Pengambilan dan Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara survey dan dilanjutkan dengan wawancara dengan Organisasi Perangkat Daerah *stake holder* dalam pengembangan industri kecil. Narasumber dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bappeda, Badan Pemberdayaan Masyarakat, para pengrajin industri kecil yang tergabung dalam sentra industri kecil batik dan pakaian jadi di Kabupaten Bojonegoro dan Tulungagung.

Dalam kegiatan ini, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pengambilan sampel industri kecil batik dan pakaian jadi di kabupaten Bojonegoro dan di kabupaten Tulungagung

Metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam dengan pengrajin industri kecil dan pejabat di pemerintah daerah lokasi penelitian, terutama Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dilakukan untuk memperoleh gambaran kebijakan pembinaan industri kecil serta kegiatan yang telah dilaksanakan untuk kemajuan industri kecil.

4. Teknik Analisa Data

Penelitian ini melakukan analisis sesuai dengan data yang diperoleh. Data survey dianalisis dengan statistik deskriptif dan korelasi. Melalui statistik deskriptif, modal-modal budaya dianalisis dengan menghubungkan kebijakan pemerintah tentang penguatan industri kecil mikro. Meskipun demikian,

ketika penelitian lapangan dilakukan, tim peneliti kesulitan memperoleh data tentang produktivitas dan hasil pemasaran industri kecil

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Industri Kecil

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Industri Kecil adalah kegiatan industri yang memperkerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) tenaga kerja dan memiliki investasi kurang dari 1 Milyar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha (Pasal 3 ayat 1). Tanah dan bangunan tempat usaha sebagai mana dimaksud dengan ayat 1 merupakan tanah dan bangunan yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha. Menurut Biro Pusat Statistik (BPS), definisi usaha (industri) kecil adalah unit usaha di sektor industri pengolahan dengan jumlah tenaga kerja 5-19 orang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian nomor Nomor 64/M-IND/PER/7/2011 tentang Jenis-Jenis Industri dalam Pembinaan Direktorat Jendral dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian, industri yang ada di Indonesia menurut cabang dan pembinaannya dikelompokkan dalam empat cabang yang mencakup Industri Material Dasar Logam, Industri Kimia Dasar, Industri Kimia Hilir, dan Industri Tekstil dan Aneka. Industri batik dan garmen termasuk dalam pembinaan Direktorat Jenderal Industri Tekstil dan Aneka.

Hampir di setiap daerah di Indonesia memiliki produk IKM yang khas seperti Sumatera Utara terkenal dengan tenun dan kerajinan Ulos, Madura dengan batiknya yang sudah diekspor ke manca negara, kerajinan bordir dari Soreang Provinsi Jawa Barat,

Probolinggo Jawa Timur, kerajinan patung kayu dari Pulau Bali, kain songket dari Sumatera Selatan, Kain Batik dari Yogyakarta. Produk- produk tersebut telah ditekuni secara turun temurun oleh masyarakat setempat, dan banyak yang sudah dikembangkan baik desain maupun penggunaannya.

Untuk meningkatkan daya saing produk tekstil dan garmen, baik daya saing di dalam negeri maupun ekspor program pengembangan berkaitan dengan a) peningkatan mutu dan desain, b) Fasilitas pengembangan *trading house*, c) Fasilitas kemitraan dalam rangka meningkatkan produksi dan pemasaran ekspor, d) Promosi penggunaan merk sendiri dan pendaftaran HAKI, e) Promosi pemasaran/partisipasi pameran, f) Fasilitas modernisasi mesin dan peralatan, g) Pengembangan layanan informasi.

Sutojo dan Ahmad (1994), bahwa ciri umum usaha kecil adalah sebagai berikut: a) Kegiatan cenderung tidak formal dan jarang yang memiliki rencana usaha, b) Struktur organisasi bersifat sederhana, c) Jumlah tenaga kerja terbatas dengan pembagian kerja yang longgar, d) Kebanyakan tidak melakukan pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan, e). Sistem akuntansi kurang baik, bahkan kadang-kadang tidak memilikinya sama sekali, f) Skala ekonomi terlalu kecil sehingga sukar menekan biaya, g) Kemampuan pemasaran serta diversifikasi pasar cenderung terbatas, dan h) Margin keuntungan sangat tipis.

Dalam penelitian Rong Xiaping (2004), pemerintah RRC juga menerapkan pengklasifikasian yang kurang lebih sama dengan pemerintah Indonesia. Untuk perusahaan kecil, jumlah tenaga kerja dibatasi kurang dari 600 orang. Hal itu berbeda pada setiap sektor. Sektor perdagangan dibatasi kurang dari 100 orang, sedangkan jumlah yang terbesar pada sektor konstruksi kurang

dari 600 orang. Tidak saja jumlah tenaga kerja, kategori itu juga ditentukan oleh jumlah penjualan (pendapatan) dan aset yang dimiliki.

Kategori dari pemerintah RRC dibandingkan negara-negara lain di Asia memang jauh lebih besar. Sejumlah negara, seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, Thailand, India dan Bangladesh, membedakan kategori menjadi lebih rinci lagi mengikuti pola Bank Dunia. Perusahaan yang jumlah tenaga kerjanya kurang dari empat orang dan aset kurang dari 300 juta rupiah atau setaranya dikategorikan industri/perusahaan mikro (*micro economic enterprise*). Industri atau perusahaan dikatakan kecil bila di atas antara 20-50 orang, bergantung kebijakan negaranya sebagai-mana dicermati oleh Tulus Tambunan (2009).

Lambannya pertumbuhan industri kecil di negara-negara sedang berkembang ini dalam pengamatan Tambunan (2009), disebabkan oleh ketidakmampuan pertanian di pedesaan dalam menyerap tenaga kerja. Sedang pertumbuhan tenaga kerja terus berkembang seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, tetapi tidak diikuti oleh perluasan lahan pertanian dan efisiensi ekonomi pertanian akibat dari perkembangan teknologi pangan. Pada gilirannya, tenaga yang tidak terserap itu melakukan urbanisasi ke kota dan mengembangkan sektor informal. Sementara itu, mereka yang tetap tinggal mengembangkan sektor *non-farm* (di luar pertanian), yaitu industri kecil rumah tangga. Sumber dana pengembangan awal berasal dari simpanan pribadi pemiliknya, pinjaman dari kerabat atau tetangga sekitarnya yang memiliki modal keuangan, serta dari pedagang sebagai pembayaran yang ditunda dan uang muka dari pelanggan.

Selain itu dari kajiannya, Tambunan (2009), menyebutkan sejumlah ciri lain dari industri/perusahaan kecil, di luar sumber

modal dari keluarga sendiri. Pertama, perusahaan kecil bergerak sektor informal, tidak terdaftar dan tidak membayar pajak. Kedua, organisasi dan manajemen ditangani oleh pemiliknya, tidak ada pembagian kerja, berikut sistem akuntansi yang tidak formal. Ketiga, tenaga kerja sering kali berasal dari anggota keluarga sendiri. Keempat, penggunaan teknologi yang rendah. Terakhir, orientasi pasarnya adalah lokal. Tentang Mentalistik pemiliknya, perusahaan ini biasanya dimiliki oleh orang yang tingkat pendidikan rendah, dari keluarga miskin dengan motif utama bertahan hidup. Sementara itu, materialnya dari lokal dengan menggunakan uang sendiri.

B. Modal Sosial

Konsep tentang modal sosial telah berkembang pada tahun 1950 an, dan awal penerapannya serta mendapatkan perhatian dari para ahli hanya pada dua puluh tahun terakhir ini. Grootaert (2002) mendefinisikan modal sosial (*social capital*) sebagai institusi, hubungan, sikap dan nilai yang mengatur interaksi antar orang dan memberikan sumbangan bagi perkembangan ekonomi dan masyarakat (*.. institutions, relationships, attitudes, and value that govern interactions among people and contribute to economic and social development..*). Dalam definisi yang lebih luas, modal sosial diperinci menjadi dua elemen. Elemen pertama dari modal social adalah *structural social capital* yang relatif dapat dengan mudah diteliti secara obyektif yaitu struktur sosial seperti jaringan, asosiasi, institusi, peraturan dan prosedur yang dilembagakan. Bentuk kedua dari modal sosial adalah *cognitive social capital* yang lebih subyektif dan tidak mudah diukur yaitu sikap, tingkah laku, nilai-nilai, hubungan timbal balik dan kepercayaan.

Kedua bentuk dari modal sosial lebih lanjut dibedakan menurut ruang lingkup dari observasi. Modal sosial dapat dilihat pada level mikro, meso atau makro. Pada level mikro, bentuk modal sosial berupa jaringan horisontal dari individu dan keluarga dan nilai yang mendasari jaringan tersebut. Pada level meso, modal sosial berupa jaringan horisontal dan vertikal diantara kelompok, juga antara individual dengan kelompok, misalnya asosiasi lokal. Yang paling luas ruang lingkungannya adalah pada level makro, modal sosial dalam bentuk lingkungan institusional dan politikal yang melatarbelakangi semua aktivitas sosial dan ekonomi. Ketiga bentuk dan ruang lingkup dari modal sosial dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:

Makro

Lembaga Negara (<i>Institution of the State</i>) Aturan Hukum (<i>Rule of Law</i>)	Governance
Lembaga Lokal, Jaringan Kerja (<i>Local institutions, network</i>)	Kepercayaan, Norma Lokal dan Nilai (<i>Trust, local norm, value</i>)

Mikro

Gambar 1.1.

Bentuk dan Ruang Lingkup Modal Sosial (Grootaert, 2002)

Penelitian Putnam (1993), menunjukkan bahwa modal sosial dalam bentuk kepercayaan (*trust*) yang tinggi mengurangi probabilitas dan mengurangi kebutuhan proses-proses pengawasan yang mahal, sehingga modal sosial mengurangi biaya transaksi. Fukuyama (1995) menemukan bahwa *trust* mendorong perilaku yang kooperatif, sehingga memudahkan pengembangan bentuk-bentuk perkumpulan atau asosiasi baru organisasi inovatif. Penelitian lainnya tentang modal sosial yang patut dipertimbangkan adalah penelitian yang dilakukan oleh Seibert, Kraimer, dan

Liden (2001), mengintegrasikan konsep modal sosial dari tiga pendekatan teoritis yang berbeda yaitu *weak-tie theory* (Granovetter, 1973), *structural hole theory* (Burt, 2005), dan *social resource theory* (Lin, 2001). Meskipun penelitian Siebert et al. (2001) menyediakan temuan yang patut dipertimbangkan. Berkaitan tentang konsep modal sosial yang lebih holistik, namun aspek-aspek kultural yaitu *trust* dan norma timbal balik (*norms of reciprocity*) yang menurut Putnam (1993) dan Fukuyama (1995) merupakan dimensi modal sosial yang paling penting, justru tidak dieksplorasi.

Piere Bourdieu (1986) mendefinisikan modal sosial sebagai kumpulan dari sumber daya potensial atau aktual yang dihubungkan dengan kepemilikan suatu jaringan yang dapat bertahan lama dari hubungan yang lebih institusional dari kenalan atau pengetahuan bersama. Modal sosial terdiri dari *social obligation* (*Connections*), yang dapat ditukar, pada kondisi tertentu, ke dalam *economic capital* dan dapat diinstitutionalkan sebagai gelar dalam masyarakat. Bersama Wacquant, Piere Bourdieu (1992) merevisi definisi modal sosial sebagai jumlah dari sumber daya, *actual* atau *virtual* yang tumbuh pada individu atau group dengan kebaikan yang dimiliki suatu jaringan yang dapat bertahan lama dari hubungan yang lebih insitusional atau kurang institusional dari kenalan atau pengetahuan bersama. Sementara itu, Coleman (1990) mendefinisikan modal sosial berdasarkan fungsinya. Modal sosial bukanlah *entity*, tetapi satu jenis *entities* yang berbeda yang memiliki dua Mentalistik. Modal sosial terdiri dari beberapa aspek struktur sosial dan memudahkan tindakan tertentu individu yang berada dalam struktur. Putnam (1993) mendefinisikan sebagai ciri-ciri organisasi sosial, seperti jaringan, norma-norma dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang

memudahkan koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan bersama. Ahli lain, Fukuyama (1995, 1997) mencermati modal sosial sebagai kemampuan orang untuk bekerjasama untuk tujuan umum dalam kelompok dan organisasi. Kemampuan itu ditunjukkan dalam bentuk *trust*.

C. Masyarakat Ekonomi Asia (MEA)

Sebagai suatu organisasi regional, ASEAN menyadari pentingnya integrasi kawasan. Visi Asean tahun 2020 berdasar pada tiga pilar yaitu ekonomi, politik dan sosial-budaya (Departemen Perdagangan RI, 2009). Sebagai upaya mempererat integrasi Asean, pada KTT Asean ke 9 tahun 2003 di Bali, dibentuklah Asean Community berdasarkan ketiga pilar tersebut, yaitu Asean political-Security Community, Asean Economic Community dan Asean Socioculture Community.

MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya sistem perdagangan bebas antara negara-negara Asean (Wikipedia). Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) resmi diberlakukan pada awal tahun 2016. Empat pilar MEA adalah, *pertama* Asean adalah pasar tunggal berbasis produksi yang didukung aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas; *kedua* Asean adalah kawasan dengan daya saing yang tinggi dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, infrastruktur, *e-commerce*, *ketiga* Asean sebagai kawasan dengan perkembangan ekonomi yang merata, dengan elemen pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta prakarsa integrasi Asean dengan negara-negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos dan Vietnam) dan *keempat* Asean sebagai kawasan yang

terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global (Asean Secretariat, 2008)

ASEAN telah menyepakati sektor-sektor prioritas menuju momen tersebut. Ketika berlangsung ASEAN *Summit* ke-9 tahun 2003 ditetapkan 11 *Priority Integration Sectors* (PIS). Namun pada tahun 2006 PIS yang ditetapkan berkembang menjadi 12 yang dibagi dalam dua bagian yaitu tujuh sektor barang industri dan lima sektor jasa. Ketujuh sektor barang industri terdiri atas produk berbasis pertanian, elektronik, perikanan, produk berbasis karet, tekstil, otomotif, dan produk berbasis kayu. Sedangkan kelima sektor jasa tersebut adalah transportasi udara, e-asean, pelayanan kesehatan, turisme dan jasa logistik.

Dalam rangka menyambut era perdagangan bebas ASEAN di ke-12 sektor yang telah disepakati, Indonesia telah mengeluarkan regulasi penting yaitu UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang telah diperkenalkan ke masyarakat sebagai salah satu strategi Indonesia membendung membanjirnya produk impor masuk ke Indonesia. UU ini antara lain mengatur ketentuan umum tentang perijinan bagi pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan perdagangan agar menggunakan bahasa Indonesia didalam pelabelan, dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Melalui UU ini pula pemerintah diwajibkan mengendalikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok bagi seluruh wilayah Indonesia. Kemudian menentukan larangan atau pembatasan barang dan jasa untuk kepentingan nasional misalnya untuk melindungi keamanan nasional.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan jika Indonesia tidak ikut dalam MEA, negara akan rugi karena produk-produk Indonesia hanya akan di blok dari negara lain. Senin, 4 Januari 2016, Jokowi juga menyampaikan langkahnya untuk menempa

dan meningkatkan daya saing SDM Indonesia dengan tidak lagi melakukan proteksi dan perlindungan maupun subsidi berlebihan. Proteksi dan pemberian subsidi dinilai hanya akan melemahkan daya saing Indonesia. Pemerintah lebih memilih memperbaiki hal yang dinilai kurang baik dan terus melakukan deregulasi dengan mengeluarkan paket kebijakan agar daya saing semaksimal baik. Jokowi mengajak masyarakat semuanya untuk bekerja keras dalam meraih pertumbuhan ekonomi. (Tempo, 2016).

BAB III

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN MODAL SOSIAL INDUSTRI KECIL

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

1. Kabupaten Bojonegoro: Mendulang dari Kemurahan Alam

a. Kondisi Geografis: Sungai Bengawan Solo itu Berkah atau Musibah?

Kabupaten ini berada di wilayah pesisir Utara Jawa Timur. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana di wilayah pesisir Utara Jawa Timur, praktis kabupaten ini berada di pegunungan kapur (Peg. Kendeng Utara). Di masa purba, pegunungan sebenarnya merupakan daerah dasar laut yang terangkat ke atas. Oleh karena itu, sejumlah temuan fosil binatang laut ditemukan di sejumlah wilayah Kabupaten Bojonegoro, salah satunya di sebelah Selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk. Fosil-fosil itu berasal antara lain dari kerang dan binatang landak laut. Fosil-fosil ditemukan pada ketinggian 335 dpl (*BeritaJatim.com*, 2016, “Temuan Fosil di Perbukitan Bojonegoro Bukti Dulu Adalah Dasar Laut”). Kalau memperhatikan kondisi fosilnya, ada dugaan hal ini terjadi ratusan ribu tahun yang lalu, dan bahkan mungkin lebih dari itu.

Sementara itu, keberadaan sungai purba, Bengawan Solo, juga menambah kekayaan fosil dan temuan pra-sejarah lainnya di kabupaten ini. Sebagaimana telah men-

Dengan kondisi lingkungan geografis di pegunungan Kendeng Utara dengan aliran sungai Bengawan Solo, pola mata pencaharian masyarakat Kabupaten Bojonegoro memiliki keunikan. Keunikan ini menjadi semakin menguat karena karakteristik iklim yang kontras. Kabupaten ini memiliki dua musim, yaitu: musim kemarau pada bulan April hingga Oktober dan musim penghujan pada bulan November hingga Maret. Di tahun 2016, cuacanya relatif tidak menentu. Pada saat musim kemarau, ada beberapa hari yang mengalami hujan. Rerata curah hujan adalah 15,31 mm³ selama 42 hari. Puncak kemarau terjadi pada bulan Juli s/d September. Di dalam bulan tersebut, masing-masing hanya 3 hari turun hujan. Reratanya hanya 5,06 mm.³ Curah hujan ini meningkat pada bulan November hingga bulan Maret sebesar 19,58 mm³ (BPS Kab. Bojonegoro, 2017). Bila di musim hujan, selain memanfaatkan air Sungai Bengawan Solo, mereka bercocok tanam dengan sistem tadah hujan. Sementara itu, di musim kemarau mereka memanfaatkan tanah dengan menanam tembakau. Tembakau ini merupakan tanaman introduksi pada masa kolonial Belanda. Tanaman ini tidak membutuhkan sedikit air. Bagian yang diambil adalah daun untuk bahan baku rokok. Daun memiliki kualitas tinggi bila tidak terkena hujan. Satu hari saja hujan, maka harga daun itu akan jatuh. Hal itu terjadi pada musim tanam tahun 2016.

Keberadaan sungai Bengawan Solo memang menjadi pasokan air minum dan air irigasi. Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1924 membangun waduk Pacal di Desa Kedungsumber, Kecamatan

Tema yang dan berfungsi tahun 1933. Dalam sejarahnya, waduk ini mampu menampung air 41 juta m³ dan mengairi sawah hingga 16.600 ha atau meliputi 10 Kecamatan. Akibat pendangkalan, kini waduk hanya menampung air sebanyak 21 juta m³ dan mengairi 13.000 ha.² Selain waduk Pacal, ada sejumlah waduk-waduk lain yang dibangun sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo, salah satunya waduk Kedung Ombo. Namun demikian, di musim hujan waduk-waduk tersebut sering tidak mampu mengendalikan banjir akibat curah hujan yang tinggi. Hampir setiap tahun, sejumlah kecamatan di Kabupaten Bojonegoro mengalami banjir kiriman. Salah satunya adalah Kecamatan Bojonegoro.

Struktur Ekonomi: Di dalam Tanah, ada Emas Hitam, Lantas untuk Siapa?

Sekitar tahun 2004, terjadi perdebatan yang cukup rumit di Jawa Timur. Perdebatan itu terkait dengan nasib masyarakat Bojonegoro. Sumur-sumur dari ladang minyak pada masa pemerintahan kolonial Belanda ternyata masih memiliki kandungan minyak yang luar biasa. Dahulu, pemerintah kolonial Belanda bersama dengan masyarakat setempat menggali sumur-sumur di tengah hutan jati, seperti di Desa Wonocolo, Kecamatan Kadewan. Pertama kali, sumur itu memancar tanpa harus menggali terlalu dalam, kini dengan tali puluhan meter dan berikut mesin baru bisa menghasilkan minyak. Orang tidak lagi melihat sumur itu potensial untuk produksi

² <http://www.kanalbojonegoro.com/waduk-gongseng-bojonegoro-bakal-gantikan-waduk-pacal/> tanggal 12 Juni 2014. Diakses tanggal 17 Agustus 2017.

dalam jumlah besar. Setelah ditinggal oleh pemerintah kolonial Belanda, usaha penambangan ini diteruskan oleh masyarakat. Ada ratusan sumur di Kecamatan tersebut, mulai dari Desa Wonocolo, Kawengan hingga Kadewan. Sebagian lagi, seperti di Desa Kawengan, dikelola oleh Pertamina. Seiring perkembangan teknologi, melalui foto satelit, sumber minyak di Kadewan dan sekitarnya ternyata masih memiliki cadangan yang cukup besar. Cadangan minyak dikenal dengan istilah Blok Cepu. Dari peristiwa ini, terjadi perebutan pengelolaan antar berbagai perusahaan. Pengelolaan ini akhirnya jatuh pada perusahaan Exxon Mobil.

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 35 tahun 2004, pengelolaan itu tidak bisa dilakukan secara sendiri, tetapi harus melibatkan perusahaan setempat. Selain menggandeng anak perusahaan Pertamina, yaitu: Pertamina EP Cepu, pengelola harus memberikan 10% saham untuk penyertaan modal (PI). Kasus PI inilah diperbincangkan antara provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Blora dan Bojonegoro. Sesuai namanya, blok Cepu, pemerintah Blora dan berikut pemerintah provinsi Jawa Tengah sepenuhnya memiliki hak penyertaan modal 10%. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Jawa Timur pun bersikeras memiliki hak yang sama, apalagi mengingat sumur-sumur minyak lebih berada di Kabupaten Bojonegoro daripada Cepu (Kab. Blora). Akhirnya, pemerintah pusat memutuskan untuk menerima 4 (empat) BUMD, yaitu PT Sarana Patra Hulu Cepu (Provinsi Jawa Tengah), PT Asri Dharma Sejahtera (Kabupaten Bojonegoro), PT Blora Patragas Hulu (Kabupaten Blora), PT Petro Gas

Jatun Utama Cendana (Provinsi Jawa Timur) Ke empat BUMD ini bekerja di bawah satu konsorsium yang dinamakan Badan Kerja Sama (BKS).³

Tabel 3.1 PDRB menurut Lapangan Pekerjaan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012-2016 (BPS Kabupaten Bojonegoro, 2017: 46)

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14,05	14,29	15,06	17,28	16,21
B	Pertambangan dan Penggalian	52,31	51,21	48,53	41,19	43,44
C	Industri Pengolahan	5,40	5,47	5,84	6,60	6,29
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
F	Konstruksi	6,29	6,57	7,18	7,99	7,68
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,35	7,57	7,92	9,07	8,91
H	Transportasi dan Pergudangan	0,71	0,76	0,86	1,04	1,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,70	0,71	0,79	0,93	0,94
J	Informasi dan Komunikasi	4,69	4,80	5,04	5,82	5,82
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,10	1,20	1,31	1,54	1,52
L	Real Estat	1,01	1,05	1,10	1,23	1,18
M,N	Jasa Perusahaan	0,12	0,12	0,13	0,15	0,15
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,09	4,06	3,91	4,49	4,30
P	Jasa Pendidikan	0,99	1,00	1,05	1,20	1,14
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,35	0,36	0,40	0,45	0,41
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,79	0,77	0,83	0,96	0,89
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kadewan,_Bojonegoro

Potensi pertambangan di Kabupaten Bojonegoro ternyata tidak terbatas pada minyak bumi. Sejumlah bukit kapur di bagian Selatan ternyata kaya akan potensi alam. Gypsum misalnya berada Kecamatan Purwosari (Desa Gapluk dan Desa Sambong) dan Desa Mojodelik di Kecamatan Purwosari. Fosfat dapat ditemukan di Kecamatan Temayang (Desa Jono), Kecamatan Bubulan (Desa Sambungrejo dan Pragelan), dan Kecamatan Dander). Sementara itu, Bentonit yang merupakan bahan baku pupuk dihasilkan dari wilayah Kecamatan Malo (Desa Ketileng) dan Kecamatan Margomulyo (Desa Geneng). Batu gamping dapat diperoleh di pegunungan kapur sekitar Kecamatan Baureno (Desa Gajah dan Desa Gunungsari), Kecamatan Dander (Desa Kunci) dan Kecamatan Kasiman (Desa Pandangi). Gunung Lawang dan Gunung Buntung di Desa Jari, Kecamatan Bubulan, menghasilkan andesit/batu. Pasir dapat ditemukan sepanjang aliran Bengawan Solo, seperti: Kecamatan Bojonegoro (Desa Banjarsari dan Desa Kalikletek), Kecamatan Malo (Desa Pagerwesi), Kecamatan Ngraho (Desa Nganti dan Blimbing Gede). Sama seperti pasir, tanah urug juga ditemui di sejumlah kecamatan yang sama. Pasir maupun tanah urug merupakan produk sedimen dari sungai Bengawan Solo, sehingga jumlah tidak pernah berkurang. Selain pasir dan tanah urug, ada pula batu lempung. Batu ini diproduksi oleh masyarakat Kecamatan Ngraho (Desa Luwihaji, Sumbergunung dan Mojorejo) dan Kecamatan Kanor (Desa Pengakan). Batu

Onyx diambil dari Gunung Kramat dan Gunung Gajah di Desa Jari, Kecamatan Bubulan.⁴

Industri Kecil: Merangkak dari Bawah, Menggapai Keuntungan

Data BPS (2017: 44) menunjukkan bahwa sektor pertanian masih memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat Bojonegoro, sekitar 39,31% dari 816.104 (320.914 orang) terlibat di dalamnya. Sektor berikutnya adalah sektor jasa dan lainnya (20,96% atau 171.103 orang) dan 135.985 orang bekerja di sektor perdagangan. Namun demikian, dari sektor formal (perusahaan), jumlah terbesar ada di sektor industri pengolahan, yaitu: 110 perusahaan dengan 14.959 tenaga kerja. Sektor berikutnya adalah sektor pertambangan dan pengalihan (lihat tabel 3.2). Perbedaan jumlah ini sebenarnya terletak pada jenis tenaga kerja yang direkrut. Mereka merupakan pegawai tetap atau kontrak.

⁴ <http://www.investasi-bojonegoro.unigoro.ac.id/index.php/en/pertambangan> diakses tanggal 4 eptember 2017.

Tabel 3.2. Lapangan Usaha dan Jumlah Perusahaan
Kab. Bojonegoro dalam tahun 2016/2017

Lapangan usaha	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1. Perikanan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan	10	1.489	385	1.874
2. Pertambangan dan Penggalian	36	3.653	457	4.110
3. Industri Pengolahan	110	4.710	10.249	14.959
4. Listrik, Gas dan Uap	13	512	188	700
5. Bangunan	---	---	---	---
6. Perdagangan eceran serta rumah tangga dan Perhotelan	129	1.012	1.602	2.614
7. Pengangkutan, Penimbunan dan Perhubungan	15	765	144	909
8. Keuangan, Asuransi, usaha Persewaan Bangunan	78	758	934	1.692
9. Jasa-jasa kemasyarakatan, sosial dan perseorangan	31	978	852	1.830
Jumlah	422	13.877	14.811	28.688

Sumber : BPS (2017: 45)

Sektor industri pengolahan yang dimaksud bukan dalam skala besar. Oleh karena itu, tenaga kerja yang diserap jauh lebih besar. Hal serupa pada sektor perdagangan eceran dan rumah tangga dan perhotelan. Pemerintah kabupaten sangat menaruh harapan pada kedua sektor itu. Ada beberapa alasan. Pertama, modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Kedua, industri tersebut dapat menampung tenaga kerja dengan kualitas yang pas-pasan. Dengan demikian, tenaga kerja dapat direkrut dari lingkungan sekitarnya.



Gambar 3.2 Motif Gatra Rinonce

Karena batik menjadi salah satu warisan dunia, sama seperti daerah-daerah lainnya, industri kecil batik pun mengalami perkembangan pesat. Namun demikian, hal itu juga tidak terlepas dari peranan pemerintah. Kompas (28/3/2011) mencatat bahwa pemerintah berusaha memperkaya motif-motif batik sejak tahun 2010. Untuk itu, ketua PKK Kab. Bojonegoro menyelenggarakan lomba desain batik. Ada berbagai ragam batik. Motif-motif baru ini tidak jauh dari kondisi sosial-ekonomi dan budaya masyarakat Bojonegoro. Motif Gatra Rinonce misalnya merupakan penyederhanaan dari alat tambang minyak.

Tabel 3.3. Pengrajin Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Kabupaten Bojonegoro

No	Nama	Jenis Industri	Alamat
1	Erlin	Rajut	Desa Bulu Kecamatan Sugihwaras
2	Moch. Mualim	Tenun	Desa Kedungrejo Kecamatan Sumberejo
3	Bambang Choirul	Tenun	Desa Tlogohaji Kecamatan Sumberejo
4	Muminatin	Tenun	Desa Simorejo Kecamatan Kanor
5	Solichah	Tenun	Desa Sarangan Kecamatan Kanor
6	Wening	Batik Cap	Desa Sobontoro Kecamatan Balen
7	Sumiatun	Batik Cap	Desa Pejambon Kecamatan Balen
8	Bambang	Batik Cap	Desa Tejo Kecamatan Kanor
9	Arum Sari	Batik Cap	Desa Mojodeso Kecamatan Kapas
10	Juwita	Batik	Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem
11	Adhe Mos	Batik	Desa Dolokgedhe Kecamatan Tambakrejo
12	Ningsih	Batik	Desa Jawik Kecamatan Tambakrejo
13	Sariati	Batik	Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo
14	April Linowati	Batik	Desa Mojosari Kecamatan Kalitidu
15	Musrini Krisnawati	Batik	Desa Mayang Rejo Kecamatan Kalitidu
16	Ana	Batik	Desa Leran Kecamatan Kalitidu
17	Herli S	Batik	Desa Sukoharjo Kecamatan Kalitidu
18	Ani	Batik	Desa Sugihwaras Kecamatan Sugihwaras
19	Kastiyani	Batik	Purwosari
20	Nanik	Batik	Jl. Teuku Umar Bojonegoro
21	Yayuk	Batik	Jl. Raya Prayungan Kecamatan Sumberrejo
22	Aris	Batik	Jl. Raya Prayungan Kecamatan Sumberrejo

No	Nama	Jenis Industri	Alamat
23	Linda	Batik	Jl. Raya Temayang Kecamatan Temayang
24	Susi Sulistyowati	Batik	Desa Jono Kecamatan Temayang
25	Mak Nie	Batik	Desa Jono Kecamatan Temayang
26	Parti	Batik	Desa Jono Kecamatan Temayang
27	Partini	Batik	Desa Jono Kecamatan Temayang
28	Ida Kasdan	Batik	Jl. Raya Purwosari
29	Sriatun	Batik	Desa Jono Kecamatan Temayang
30	Sukartik	Batik	Desa Jono Kecamatan Temayang
31	Rudi	Batik	Jl. Basuki Rahmat Kecamatan Temayang
32	Eni Latansa	Batik	Kecamatan Dander
33	Rochim	Batik	Jl. Basuki Rahmat Gg. Anggrek Kecamatan Temayang

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro, 2017



Gambar 3.3 Motif Mijil Mas

Motif lain yang tidak kalah khas antara lain adalah Jagung Mijil Mas, Mliwis Mukti, Parang Dahono Munggal, Parang Lembu Sekar Linambat dan Sata

Gondowangi. Motif Jagung Mijil Mas menggambar produk jagung yang berlimpah di wilayah Bojonegoro. Sementara itu, motif Mliwis Putih menggambarkan kisah prabu Angling darma. Kisah merupakan mitologi kabupaten ini. Di dalam mitologinya, prabu atau raja ini berkuasa atas wilayah Bojonegoro. Ia mampu berkomunikasi dengan binatang. Ia juga bisa beralih menjadi burung. Motif Parang Dahono Munggal menggambar situs api tidak pernah padam, yaitu kayangan api. Situs ini menjadi tempat pengambil api upacara PON XV tahun 2000. Motif Parang Lembu Sekar Linambat menggambarkan keinginan untuk menjadi pusat peternakan sapi. Akhirnya, motif Sata Gondowangi melukiskan panen tembakau yang berkualitas (Fitiline, 2013). Tembakau merupakan salah produk unggulan masyarakat Kab. Bojonegoro. Beberapa perusahaan rokok menjadi pembeli dari produk tersebut. Luas lahan tanam 8,883 ha dengan produk sebesar 10.600 ton sekali panen (Jawapos, 01/08/2017).⁵

2. Kabupaten Tulungagung: Dari lereng Gunung Wilis, mendulang rezeki dari Peg. Kendeng Selatan

a. Kondisi Geografis: Dari masa ke masa, berjuang melawan banjir?

Ada sejumlah sejarah yang mengaitkan nama dari kabupaten ini. Tulungagung bisa berasal dari *pitulungan*

⁵<https://www.jawapos.com/radarbojonegoro/read/2017/08/01/4746/delapan-pabrikasiap-beli-tembakau>

agung, pertolongan besar.⁶ Kabupaten yang terletak 154 km Barat Daya dari Surabaya, ibukota propinsi ini dikenal sebagai wilayah yang sering mengalami bencana alam, khususnya banjir. Ada mitologi yang menceritakan bahwa banjir bersumber dari mata air Ngrowo. Mata air ini kemudian disumbat oleh Joko Baru Klinting dengan lidi pohon aren (enau). Kisah yang lain adalah pembuatan bendungan Niyama. Bendungan ini dibuat pada masa pemerintahan jajahan Jepang (Oktober 1943-Juli 1944) dan diselesaikan pada pemerintahan Sukarno untuk terowongan Niyama 1 (1961) dan Suharto untuk bendungan Niyama 2 (1986).⁷ Terowongan dan bendungan ini digunakan untuk mencegah banjir dan persediaan air untuk persawahan. Kini, terowongan dan bendungan ini juga menjadi obyek wisata.

Sejarah dan kebudayaan di Tulungagung sebenarnya jauh melintasi waktu sebagaimana digambarkan dalam mitologi Jaka Baru Klinting atau kisah pembangunan terowongan Niyama. Puluhan ribu tahun yang lalu, tepatnya sekitar 40.000 s.d. 25.000 tahun yang lalu, wilayahnya telah dihuni oleh manusia. Tahun 1889 Van Riestchoten menemukan fosil *Homo wajakensis* di Desa Wajak. Fosil ini diambil dari lapisan *pleistosen*. Dalam kajian Eugene Dubois tentang fosil ini, *Homo wajakensis* diduga merupakan keturunan dari *Homo Soloensis*. *Homo wajakensis* juga sebagai perpaduan antara

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tulungagung diakses tanggal 17 Agustus 2017.

⁷ <http://historia.id/modern/terowongan-neyama-romusha> diakses tanggal 3 September 2017.

Mongoloid dan Australomelanesoid dan lebih banyak memiliki persama-an fisik dengan suku Aborigin di Australia.⁸

Catatan sejarah lain ditemukan prasasti tahun 1205 M. Prasasti ini menyatakan penghargaan masyarakat Thani Lawadan dari raja terakhir Daha, Kertajaya atas usaha menahan serangan musuh. Thani Lawadan terletak di selatan kecamatan kota Tulungagung. Sementara itu, Desa Boyolangu dicatat oleh Mpu Prapanca dalam kitab *Negara-kertagama* (1365 M/1287 Saka). Catatan itu menceritakan pendirian Candi Prajnyaparamitapuri sebagai penghormatan kepada Gayatri (Sri Rajapatni), istri keempat Raden Wijaya (pendiri Kerajaan Majapahit). Gayatri juga merupakan ibu dari raja ketiga Majapahit Sri Gitarja (Tribhuwanatunggadewi).⁹ Saat ini candi ini lebih dikenal dengan nama Candi Gayatri. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa Tulungagung telah menunjukkan peran penting dalam sejarahnya. Di pihak lain, wilayah Tulungagung telah mampu mensejahterakan warganya dengan berbagai dinamikanya.

Bila mencermati peta topografi (gambar 3.4), maka Kabupaten Tulungagung memiliki variasi dari pegunungan hingga pantai. Di bagian Utara, wilayahnya persis di bawah puncak Gunung Wilis dan di bagian selatan merupakan daerah pesisir pantai Selatan yang berbatasan dengan Samudera Indonesia. Wilayah yang tertinggi

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Homo_wajakensis diakses tanggal 3 September 2017.

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tulungagung diakses tanggal 17 Agustus 2017.

adalah Kecamatan Sedang (2.552 m), sedangkan terendah adalah Kecamatan Campur darat mendekati 0 m di atas permukaan laut. Di wilayah Selatan, ada pegunungan kapur Gunung Kendeng Selatan atau dikenal dengan Pegunungan Kidul (Kidul berarti Selatan dalam bahasa Jawa). Rata-rata ketinggian adalah 85 m. Ada sungai Ngrowo yang merupakan anak dari kali Brantas. Kali ini yang disinyalir menyebabkan banjir tahunan.



Gambar 3.4. Peta Topografi Kabupaten Tulungagung
(Bappeda, 2016)

b. Struktur Ekonomi: Mengolah dari Alam, mulai dari Batu Marmer hingga Perdagangan Eceran

Bila memperhatikan tabel 3.4., maka struktur ekonomi masyarakat Kab. Tulungagung masih tiga sektor. Sektor pertama adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Banjir tahunan yang lambat laun dapat diatasi dengan saluran Niyama telah memberikan keberuntungan, yaitu: kebutuhan air untuk irigasi. Saluran dan bendungan ini telah menyediakan air untuk pertanian. Pertanian tidak lagi tadah hujan, tetapi lebih pada

pertanian sawah yang tidak “mengenal” batas waktu. Musim tanam meningkat tidak lagi satu kali dalam setahun, tetapi sudah 3 (tiga) kali dalam setahun pada wilayah tertentu. Di sisi lain, perikanan juga berkembang untuk wilayah Selatan yang berada di tepian Samudera Hindia.

Tabel 3.4 PDRB menurut Lapangan Pekerjaan Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2016 (BPS Kabupaten Tulungagung, 2017: 436)

Lapangan Usaha Industry		2014	2015 [†]	2016 [‡]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5 759 871.79	6 356 104.64	6 805 465.55
B	Pertambangan dan Penggalian	1 036 450.67	1 098 867.93	1 168 850.94
C	Industri Pengolahan	5 281 704.92	5 873 823.77	6 486 637.81
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8 673.20	9 645.94	10 347.88
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21 622.00	23 652.18	26 031.30
F	Konstruksi	2 476 897.36	2 629 840.94	2 908 095.66
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5 111 966.92	5 639 286.47	6 256 565.55
H	Transportasi dan Pergudangan	513 186.21	585 563.29	657 946.98
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	465 435.52	537 699.68	612 927.91
J	Informasi dan Komunikasi	1 385 338.54	1 524 237.68	1 679 168.59
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	585 597.70	656 215.59	728 908.82
L	Real Estate	494 641.47	562 633.67	612 175.26
M, N	Jasa Perusahaan	94 673.92	105 121.99	113 557.93
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	857 997.31	931 769.10	1 026 382.69
P	Jasa Pendidikan	1 093 376.15	1 213 864.25	1 323 463.28
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	268 989.02	296 761.71	313 752.16
R, S, T, U	Jasa lainnya	324 166.89	370 206.32	396 958.49
Produk Domestik Regional Bruto Gross Regional Domestic Bruto		25 780 589.58	28 415 295.14	31 127 236.80

Peran sektor pertanian, kehutanan dan perikanan juga nampak pada penyerapan tenaga kerjanya. Empat puluh persen lebih penduduk berusia 15 tahun ke atas bekerja di sektor tersebut. Sama seperti PDRB, sektor berikutnya adalah industri pengolahan, yaitu sebesar 19,39% dan sektor perdagangan sebesar 18,90% dari 550.358 (tahun 2015) (BPS Kab. Tulungagung, 2016) (lihat tabel 3.5).

Tabel 3.5 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2015

No.	Jenis Kegiatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	133.858	86.744	220.602
2	Pertambangan dan Penggalian	2.034	-	2.034
3	Industri Pengolahan	47.534	59.195	106.729
4	Listrik, Gas, dan Air	1.122	-	1.122
5	Bangunan	36.154	605	36.759
6	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	44.786	59.238	104.024
7	Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	8.714	-	8.714
8	Keuangan, Asuransi, Usaha, Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	4.089	2.661	6.750
9	Jas Kemasyarakatan, Sosial, dan Perseorangan	32.381	32.365	64.746
Keseluruhan		309.550	240.808	550.358

Sumber : BPS

(https://tulungagungkab.bps.go.id/website/tabelExcelIndo/Indo_6_18088535.xls)

Sektor pengolahan memang merupakan salah satu andalan dari Kabupaten Tulungagung, selain sektor pertanian dan sejenisnya. Sektor ini mengolah hasil alam dan produk lain menjadi produk yang bisa digunakan. Dalam pengkategorian BPS, ada 9 (sembilan) item industri pengolahan. Pertama, industri bergerak di bidang makanan, minuman dan tembakau. Sebagaimana kabupaten lainnya, masyarakat Kab. Tulungagung juga mengolah menjadi makanan khas Kab. Tulungagung, mulai dari sate dan kambing, ayam lodho hingga jajanan sagon, enting-enting kacang (geti), dan jenang syabun serta krupuk rambak.^{10,11}

No.	Jenis Industri	IKKR		Industri Sedang		Industri Besar	
		Unit	Tenaga Kerja	Unit	Tenaga Kerja	Unit	Tenaga Kerja
1	Makanan, minuman, dan tembakau	1.270	6.686	18	308	2	200
2	Tekstil, barang kulit dan alas kaki	1.638	17.040	9	198	2	200
3	Barang kayu dan hasil hutan lainnya	3.033	7.226	-	-	-	-

¹⁰ <https://tempatwisataindonesia.id/makanan-khas-tulungagung/>

¹¹ <https://disiniaja.net/makanan-khas-tulungagung/>

No.	Jenis Industri	IKKR		Industri Kecil		Industri Besar	
		Unit	Tenaga Kerja	Unit	Tenaga Kerja	Unit	Tenaga Kerja
5	Pupuk, kimia dan barang dari karet	35	148	-	-	1	17
6	Semen dan barang galian non logam	1.757	5.162	1	50	4	1.124
7	Logam dasar, besi dan baja	667	3.397	10	195	2	127
8	Alat angkutan, mesin dan peralatannya	29	131	2	8	-	-
9	Barang lainnya	28	370	1	10	1	126
	2015	8.492	40.369	41	769	13	2.188
	2014	8.469	40.306	39	769	14	2.188
	2013	8.291	39.672	33	1.294	14	4.544
	2012	7.514	31.410	19	1.048	23	4.444
	2011	7.457	31.250	18	1.023	21	4.239
	2010	7.404	30.937	18	1.023	21	4.239
	2009	7.374	30.775	18	1.023	21	4.239

Industri kedua adalah tekstil, barang kulit dan alas kaki. Produk tekstil mulai dari bahan hingga pakaian jadi, begitu pula dengan barang kulit dan alas kaki. Industri barang kayu dan hasil hutan, kertas dan barang cetakan, pupuk, kimia dan barang dari karet adalah industri-industri pengolahan ke 3 hingga ke-5. Selain itu, industri marmer digolongkan sebagai industri semen dan barang galian non-logam. BPS juga memasukkan industri pengolahan logam dasar, besi dan baja dalam kategori industri pengolahan. Selain itu, industri pengolahan lainnya adalah sektor usaha perbaikan alat angkutan, mesin dan peralatannya, serta barang lainnya. Tabel 4.6 menunjukkan sektor industri kecil rumah tangga tetap merupakan sektor yang dominan. Perlu dicatat juga, dari tahun 2009 hingga 2015, sektor industri kecil kerumah-tanggaan ini cenderung meningkat dari sisi jumlah usaha dan tenaga kerja yang diserap, mulai 7.374 unit dengan 30.775 orang hingga mencapai 8.492 unit dengan 40.369 orang.

c. Industri Kecil: *Berkembang sesuai dengan Kondisi Geografis Sekitarnya*

Ada hal yang menarik dalam tabel 3.5. Bila dipilahkan berdasarkan potensi tenaga kerja berbasis gender, maka ada 2 (dua) kelompok besar yang memberikan peluang tenaga kerja. Sektor berbasis tenaga kerja “laki-laki” adalah sektor logam dasar, besi dan baja, sektor semen dan bahan galian non-logam, serta sektor bahan kayu dan hasil hutan. Sementara itu, sektor berbasis tenaga kerja “perempuan” adalah sektor tekstil (minus barang kulit dan alat kaki) dan sektor makanan, minuman (dan tembakau). Kedua sektor ini hampir

seimbang jumlahnya dari sisi tenaga kerja yang diserap. Sektor “laki-laki berjumlah 5.457 unit dengan tenaga kerja sebanyak 15.785 orang, sedangkan sektor “perempuan” sebanyak 2.908 unit dengan 23.726. Singkat kata, mes-kipun unit usahanya hanya separuh dari sektor “laki-laki”, tetapi kemampuan menyerap tenaga kerjanya jauh lebih banyak, sekitar 1,5 kalinya. Namun demikian, industri-industri ini masih belum bisa sepenuhnya menampung penduduk usia produktif untuk bekerja. Hasil penelitian IB Wirawan (2006) menunjukkan bahwa Kab. Tulung-agung masih merupakan salah pemasok tenaga kerja ke luar negeri, khususnya TKW. Data BPS (2017) juga membuktikan terjadi peningkatan jumlah TKI/TKW yang resmi hampir dua kali lipat pada tahun 2016, dari semula 1.644 orang (2015) menjadi 3.461 orang (2016).

Tabel 3.7 Industri Kecil/Kerajinan Rumah Tangga menurut Kecamatan dan Jenisnya, 2009-2015

Kecamatan	Makanan, Minuman dan Tembakak		Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki		Barang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya		Kertas dan Barang Cetakan		Pusat, Kain dan Barang Dari Kain		Seram dan Barang Galian Non Logam		Logam Dasar, Besi dan Baja		Aneka Angkut, Mesin dan Peralatan		Barang Lainnya	
	Unit	TK	Unit	TK	Unit	TK	Unit	TK	Unit	TK	Unit	TK	Unit	TK	Unit	TK	Unit	TK
Besuki	144	579	14	70	4	8	1	1	-	-	64	538	4	12	-	-	-	-
Banawang	90	223	23	72	17	39	1	4	2	17	28	104	15	55	1	3	-	-
Pakel	35	121	12	56	257	364	-	-	-	-	28	78	7	18	-	-	-	-
Kampungan	27	172	8	26	9	55	1	1	5	12	159	3257	8	22	-	-	-	-
Tunggulrejo	5	32	4	14	11	26	-	-	-	-	19	58	8	0	-	-	-	-
Kudus	28	75	8	30	202	142	-	-	2	16	123	382	5	15	1	2	-	-
Panungteben	2	8	6	15	18	85	-	-	-	-	155	260	5	13	-	-	-	-
Kajangan	82	199	7	36	18	26	1	40	5	15	78	212	5	25	1	-	1	4
Ngusut	48	149	10	372	301	792	1	18	1	7	315	409	134	1531	10	10	8	113
Santolo	15	262	20	60	504	882	1	18	1	5	25	75	11	55	-	-	-	-
Kayolang	171	1.036	435	3.327	23	58	1	1	7	26	126	448	45	54	1	2	-	-
Tuhapung	71	1.595	317	7.386	15	40	18	103	1	8	12	81	55	204	1	28	12	159
Karangayu	165	1.100	559	2.483	12	40	1	1	9	20	11	107	50	127	4	16	5	70
Ngantur	174	669	8	61	247	925	-	-	2	25	25	45	7	31	3	24	-	-
Kawadjo	11	120	28	87	5	23	-	-	-	-	46	285	40	202	5	25	-	-
Kuanan	20	81	124	728	8	34	-	-	-	-	11	51	8	81	1	2	-	-
Dombak	210	488	23	62	1.422	3.580	2	3	4	4	556	3.050	264	850	1	2	2	22
Pugerwojo	8	4	7	30	30	87	-	-	-	-	3	9	3	13	-	-	-	-
Sombang	8	25	8	19	18	22	-	-	-	-	25	40	7	22	-	-	-	-
2009	1.219	6.686	1.652	17.342	1.899	7.226	35	209	35	148	1.757	5.362	668	1.411	93	150	18	578
2010	1.279	6.686	1.652	17.342	1.899	7.226	35	209	35	148	1.757	5.362	668	1.411	93	149	18	578
2011	1.245	6.641	1.593	16.827	1.813	7.182	18	208	25	138	1.717	5.262	619	1.292	19	108	27	567
2012	1.245	6.641	1.593	16.827	1.813	7.182	18	208	25	138	1.717	5.262	619	1.292	19	108	27	567
2013	1.245	6.641	1.593	16.827	1.813	7.182	18	208	25	138	1.717	5.262	619	1.292	19	108	27	567
2014	1.245	6.641	1.593	16.827	1.813	7.182	18	208	25	138	1.717	5.262	619	1.292	19	108	27	567
2015	1.245	6.641	1.593	16.827	1.813	7.182	18	208	25	138	1.717	5.262	619	1.292	19	108	27	567
2016	1.245	6.641	1.593	16.827	1.813	7.182	18	208	25	138	1.717	5.262	619	1.292	19	108	27	567
2017	1.185	6.313	1.491	16.241	1.806	7.115	27	291	33	127	1.712	5.137	602	1.126	18	102	22	558

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung (<https://tulungagungkab.bps.go.id/linkTabelStatis/excel/id/673>).

Bila memperhatikan tabel 3.7, maka terlihat suatu pola pertumbuhan industri kecil. Industri kecil semen dan barang galian non-logam lebih banyak berkembang di Kec. Gondang. Karena berada di bawah Gunung Wilis, sejumlah pengusaha mengembangkan jasa pengambilan berbagai pasir urug. Hal itu dilakukan oleh masyarakat sekitar sungai. Dengan peralatannya, mereka mengambil pasir untuk dijual sebagai bahan bangunan. Selain itu, mereka juga mengembangkan industri batu bata dan genteng.

Sementara itu, di bagian Selatan, seperti Kec. Boyolangu, Ngunut, Pucaklaban, Kauman dan Campur darat mengandalkan produk olahan bahan batuan alam. Kecamatan-kecamatan berada di bagian selatan dengan pegunungan kapur Kendeng Selatan. Pegunungan Kapur, khususnya marmer, digali dan diolah menjadi berbagai peralatan hidup.

Selain terkenal dengan olahan bahan batuan, masyarakat Kec. Ngunut ternyata mengembangkan industri untuk tekstil, khususnya pakaian jadi. Industri ini tidak saja berkembang di kecamatan tersebut, tetapi sejumlah kecamatan di sekitar pusat ibukota, seperti Boyolangu, Tulungagung dan Kedungwaru juga melakukan hal yang serupa. Perkembangan di ketiga kecamatan ini tidak terlepas dari pusat pemasaran, yaitu di sejumlah pasar ibukota kabupaten. Dari data tabel 3.7 ada 1.031 unit usaha konveksi atau sejenisnya berdiri di wilayah tersebut atau sekitar 62,41%. Unit usaha tersebut mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 11.996 orang atau 69,98% dari seluruh tenaga kerja di sektor tersebut.

Tabel 3.8. Sentra industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Kabupaten Tulungagung

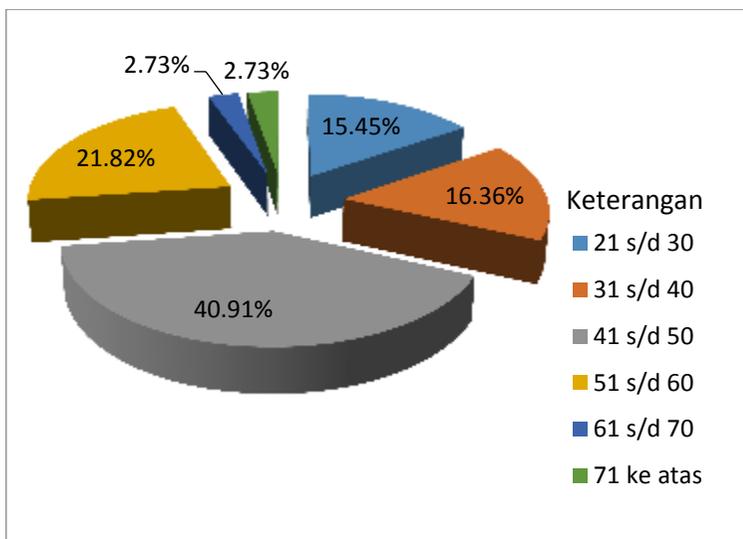
No	Sentra	Unit Desa/Kecamatan	TK	Investasi (Rp.000,-)	Produksi (Rp.000,-)	Bahan Baku (Rp.000,-)
1	Baju Muslim	5 Babudan/Karangrejo	12	60.000	849.600	260.050
2	Batik	12 Mojosari/Kaumuan	82	345.970	492.000	108.595
3	Batik	10 Mojosari/Kaumuan	75	350.030	484.965	105.000
4	Batik	9 Majan/Kedungwaru	105	97.727	938.946	149.855
5	Batik	8 Kalangbes/Kaumuan	90	340.650	540.000	69.120
6	Batik	6 Sendang/Sendang	20	148.000	120.000	25.360
7	Batik	7 Bangsan/Kedungwaru	26	264.000	156.000	39.968
8	Batik	5 Padangan/Ngumtu	14	122.000	84.000	20.752
9	Boedir	11 Rejosari/Gondang	51	173.000	342.075	85.519
10	Konveksi	124 Botoran/Tulungagung	760	257.525	117.943.488	58.368.000
11	Konveksi	17 Moyoketen/Bojolanu	105	595.000	3.024.000	1.649.970
12	Konveksi	11 Karangrejo/Bojolanu	28	385.000	809.600	437.197
13	Konveksi	14 Beji/Bojolanu	38	490.000	1.088.640	593.989
14	Konveksi	32 Subomoro/Bojolanu	362	1.921.433	22.284.720	12.409.288
15	Konveksi	17 Tawangsuji/Kedungwaru	194	91.520	2.112.857	1.272.086
16	Konveksi	37 Mangunsari/Tulungagung	185	815.000	8.523.875	5.114.325
17	Konveksi	31 Sembung/Tulungagung	160	760.000	10.457.813	6.274.688
18	Konveksi	19 Katoanyar/Tulungagung	279	1.216.000	12.790.800	6.892.820
19	Konveksi	31 Teseh/Tulungagung	227	1.117.500	9.806.400	5.284.560
20	Konveksi	15 Karangwaru/Tulungagung	535	118.575	23.287.500	13.072.266
21	Konveksi	47 Botoran/Tulungagung	235	470.000	21.150.000	11.420.086
22	Konveksi	20 Bahangsari/Kaumuan	177	224.700	1.045.970	334.885
23	Konveksi	9 Dakub/Gondang	29	97.000	453.600	113.400
24	Konveksi	11 Bungin/Karangrejo	118	116.475	6.631.500	1.637.875
25	Konveksi	9 Sukowiyono/Karangrejo	42	532.920	1.043.000	260.750
26	Konveksi	5 Tanon/Kedungwaru	74	187.991	2.509.500	627.375
27	Konveksi	10 Kauman/Tulungagung	145	639.772	5.946.912	1.486.728
28	Konveksi	21 Kumpangdalam/Tulungagung	542	941.510	31.242.700	7.810.675
29	Konveksi	20 Tansman/Tulungagung	615	1.246.971	22.021.400	8.505.350
30	Konveksi	5 Tulungrejo/Karangrejo	13	80.000	1.139.000	766.990
31	Konveksi	5 Mojosari/Kaumuan	54	81.400	1.540.560	115.428

B. Karakteristik Responden

1. Jenis Kelamin, Usia dan Status Kawin

Dari 110 responden yang diwawancarai, baik dari Kab. Tulungagung dan Kab. Bojonegoro, sebagian besar adalah pemilik usaha yang berjenis kelamin laki-laki. Hanya ada 30 orang perempuan. Status mereka menggantikan usaha dari suami atau keluarganya karena suami meninggal. Data lain

juga menyebutkan bahwa karena orang tua sudah tua, usaha ini dilimpahkan pada anak-anaknya. Anak mereka yang belum menikah juga diberi tanggung-jawab yang tidak jauh berbeda. Ada 14 orang (12,7%) masih belum menikah. Selebihnya, 84,5% atau 93 orang telah menikah, 3 orang pernah menikah (2,72 %).



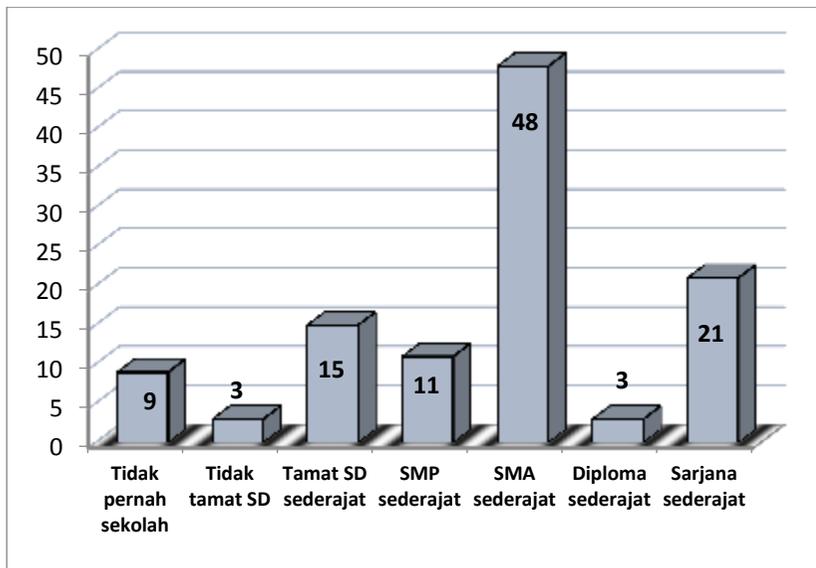
Gambar 3.5. Usia Responden

Gambar 3.5 menunjukkan bahwa terbesar (40,91%) berusia antara 41 s/d 50 tahun. Sementara itu, usia responden lainnya tersebar dalam beberapa kategori usia, paling muda adalah usia 21 tahun dan paling tua di atas 71 tahun, tepatnya 81 tahun. Sebagian besar mereka bisa dikatakan pengusaha yang muda, tetapi berpengalaman. Mereka telah mengalami masa-masa sulit, yaitu: ketika krisis ekonomi tahun 1997-2000, apalagi menghadapi gempuran produk dari China. Di

dalam usia tersebut, mereka juga cukup bijaksana dan berhati-hati dalam mengelola usahanya. Namun demikian, mereka menyadari bahwa kreatifitas menjadi salah satu kunci utama dalam usaha tekstil, baik batik (Kab. Bojonegoro) maupun pakaian jadi (Kab. Tulungagung).

2. *Tingkat Pendidikan*

Dari sisi pendidikan, ada beberapa hal yang menarik. Pertama, ada responden yang mengaku tidak pernah bersekolah. Mereka mengembangkan usaha dengan belajar *oto-didak*. Di dalam ceritanya, mereka pertama kali belajar bekerja di industri tekstil sebagai buruh. Mereka mengamati dan melakukan pekerjaan. Sambil bekerja, mereka menabung dan membangun jaringan pembeli. Setelah itu, baru mereka membuka usaha. Pertama kali mereka mendirikan tidak dalam skala besar.

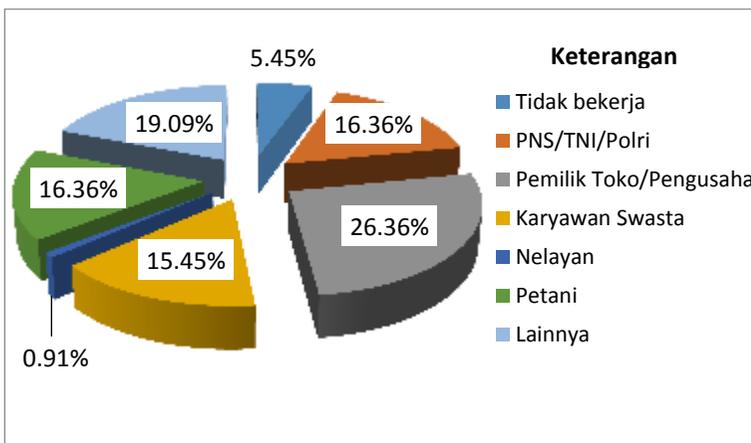


Gambar 3.6 Tingkat Pendidikan Responden

Namun demikian, tingkat pendidikan pengusaha lebih banyak telah menamatkan SMA atau sederajat (48 orang atau 43,64%). Mereka tidak meneruskan ke perguruan tinggi, tetapi memilih membantu orang tua dan pada gilirannya meneruskan usaha tersebut. Di sisi lain, dalam jumlah yang tidak begitu besar, mereka terus menempuh pendidikan tinggi menjadi sarjana.

3. Jenis Pekerjaan

Tidak semua responden menyebutkan bahwa pengusaha atau pemilik toko sebagai pekerjaan utamanya. Nampaknya, sesuai dengan tingkat pendidikannya, mereka juga memiliki peluang di sektor lain. Ternyata sektor usaha batik dan pakaian jadi bagi sebagian responden merupakan pekerjaan sampingan. Hanya 26,36% responden “berani” mengatakan bahwa usaha industri batik dan pakaian jadi sebagai pekerjaan utamanya.



Gambar 3.7 Jenis Pekerjaan Responden

Usaha batik dan pakaian jadi juga dikembangkan oleh keluarga PNS/TNI/ Polri. Di dalam keluarga tersebut, ada pembagian kerja. Usaha ini merupakan pekerjaan tambahan dan istri-istri mereka. Melalui jaringannya, para suami atau tepatnya kepala keluarga membantu memasarkan produknya. Produk mereka tawarkan pada teman sekerjanya atau dimasukkan ke koperasi pegawai atau sejenisnya. Melalui kope-rasi, para pembeli bisa memperoleh dengan membayar secara kredit (potong gaji di bulan berikutnya). Hal ini merupakan salah satu strategi memenuhi kebutuhan dasar, terutama di era masa pemerintahan orde baru. Pada masa itu, pendapatan PNS/TNI/Polri tidak begitu besar dibandingkan saat ini.

Selain pegawai negeri, keluarga petani juga melakukan hal serupa. Usaha batik dan/atau pakaian jadi merupakan pekerjaan *off-farm* dalam kajian sosiologi perdesaan. Hal itu dilakukan terutama oleh para perempuan. Teknologi pertanian yang semakin canggih ternyata menyebabkan para perempuan terpinggirkan. Pekerjaan para perempuan di sawah lambat laun digantikan oleh para laki-laki. Perempuan hanya terbatas pada waktu tanam padi saja, selebihnya sudah dilakukan oleh laki-laki, mulai dari menyiangi hingga memanen padi. Ketika telah dipetik pun, perempuan tidak memperoleh kesempatan. Dulu perempuan bekerja menumbuk padi, kini digantikan oleh mesin penggiling. Dengan kondisi yang demikian, para perempuan tidak bisa membantu suami untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Mereka pun tidak tinggal diam. Melalui usaha pem-buatan batik dan/atau pakaian jadi mereka memperoleh tam-bahan pendapatan. Di pihak, pekerjaan rumah tangga pun tidak ditinggalkan. Semua pekerjaan itu

dilakukan di rumah. Memang, sejumlah karyawan pembuat pakaian jadi di Kab. Tulungagung dilakukan oleh laki-laki.

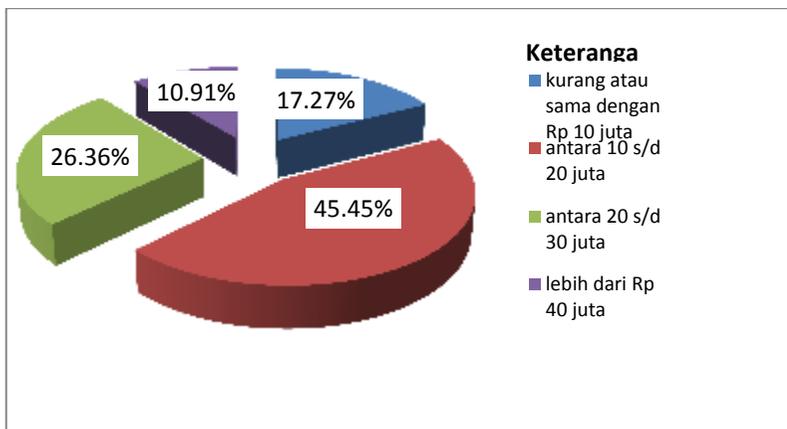
Usaha batik dan pakaian jadi juga dikembangkan oleh keluarga PNS/TNI/ Polri. Di dalam keluarga tersebut, ada pembagian kerja. Usaha ini merupakan pekerjaan tambahan dan istri-istri mereka. Melalui jaringannya, para suami atau tepatnya kepala keluarga membantu memasarkan produknya. Produk mereka tawarkan pada teman sekerjanya atau dimasukkan ke koperasi pegawai atau sejenisnya. Melalui koperasi, para pembeli bisa memperoleh dengan membayar secara kredit (potong gaji di bulan berikutnya). Hal ini merupakan salah satu strategi memenuhi kebutuhan dasar, terutama di era masa pemerintahan orde baru. Pada masa itu, pendapatan PNS/TNI/Polri tidak begitu besar dibandingkan saat ini.

Selain pegawai negeri, keluarga petani juga melakukan hal serupa. Usaha batik dan/atau pakaian jadi merupakan pekerjaan *off-farm* dalam kajian sosiologi perdesaan. Hal itu dilakukan terutama oleh para perempuan. Teknologi pertanian yang semakin canggih ternyata menyebabkan para perempuan terpinggirkan. Pekerjaan para perempuan di sawah lambat laun digantikan oleh para laki-laki. Perempuan hanya terbatas pada waktu tanam padi saja, selebihnya sudah dilakukan oleh laki-laki, mulai dari menyiangi hingga memanen padi. Ketika telah dipetik pun, perempuan tidak memperoleh kesempatan. Dulu perempuan bekerja menumbuk padi, kini digantikan oleh mesin penggiling. Dengan kondisi yang demikian, para perempuan tidak bisa membantu suami untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Mereka pun tidak tinggal diam. Melalui usaha pembuatan batik dan/atau pakaian jadi mereka

memperoleh tambahan pendapatan. Di pihak, pekerjaan rumah tangga pun tidak ditinggalkan. Semua pekerjaan itu dilakukan di rumah. Memang, sejumlah karyawan pembuat pakaian jadi di Kab. Tulungagung dilakukan oleh laki-laki.

4. Pendapatan Keluarga

Pendapatan ini bukan merupakan omzet penjualan usaha kecil, tetapi lebih merupakan penghasilan yang digabung dari usahanya dan pekerjaan lainnya. Perlu diketahui, bahwa sebagian pengusaha ini masih melakukan pekerjaan lain. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk tetap menyelamatkan keluarganya ketika dalam situasi krisis. Singkat kata, di dalam perjalanan hidupnya, mereka mengembangkan usaha dengan tidak dalam kondisi yang lancar, tetapi jatuh bangun. Penyebabnya bervariasi, ada faktor internal, tetapi ada faktor eksternal. Faktor internal misalnya proses adaptasi awal ketika harus mencari peluang pemasaran. Sementara itu, menurut pengakuan mereka dalam FGD, faktor eksternal berasal dari situasi krisis moneter dan serangan produk dari China.



Gambar 3.8 Pendapatan Keluarga

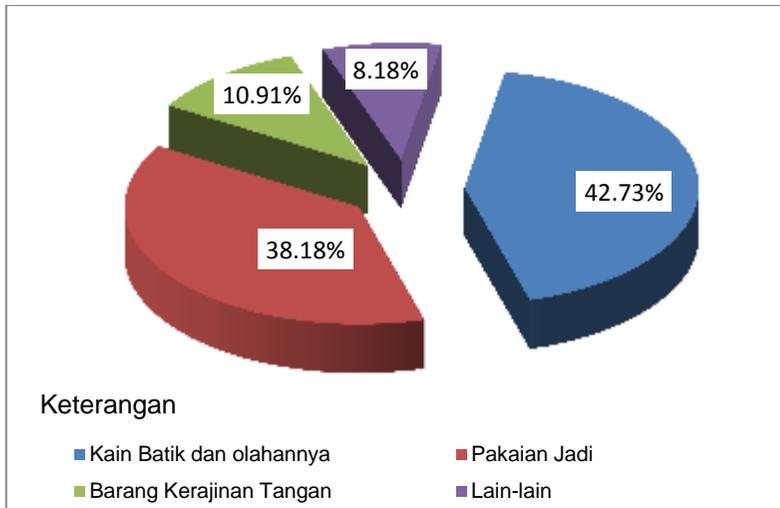
Bila memperhatikan tabel 3.8, maka usaha tersebut sebenarnya telah dapat memenuhi kebutuhan keluarga dengan jauh lebih layak. Di Kab. Bojonegoro dan Kab. Tulungagung, keluarga hanya membutuhkan sekitar 3 hingga 4 juta rupiah untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan 4 (empat) jiwa. Setelah ditelusuri, menurut hasil pengakuan mereka, pendapatan terendah sekitar 9 juta rupiah. Sementara itu, sebagian besar di atas 10 juta rupiah.

C. Profil Usaha

1. Jenis Usaha dan Lama Usaha

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Bojonegoro dan Tulungagung. Ada 110 pengrajin atau pengusaha kecil yang menjadi responden penelitian ini. Ada 60 pengusaha industri kecil dari Kab. Bojonegoro dan 50 dari Kab. Tulung-agung. Kedua pengusaha ini bergerak di bidang yang kurang lebih sejenis. Pengusaha industri kecil Kab. Bojonegoro mengembangkan batik Jonegoroan, sedangkan pengusaha industri kecil Kab. Tulungagung membuat pakaian jadi dan batik. Dari hasil lapangan, pengusaha industri kecil di Bojo-negoro tidak saja membuat kain batik, tetapi juga mengolah-nya menjadi berbagai bentuk, mulai dari pakaian, selendang, kain *gedongan* hingga kerajinan berbahan batik, seperti: tas komputer dan dompet. Sudah barang tentu, kerajinan tersebut tidak terbuat dari batik tulis, tetapi batik cap. Mereka mena-warkan langsung dan melalui internet. Tidak berbeda dengan pengrajin batik Kab. Bojonegoro, pengrajin pakaian jadi juga mengembangkan berbagai varian, mulai dari pakaian perem-puan hingga pakaian pria dan anak-anak. Pakaian perempuan yang dibuat terdiri dari pakaian

daleman, seragam, hingga pakaian muslim. Variasi bentuk dan model ini dilakukan juga pakaian untuk pria dewasa dan anak-anak.



Gambar 3.9 Produk Industri Kecil Responden

Dari sisi waktu, ada pengrajin yang baru memulai usaha pada awal tahun ini. Mereka tertarik mengembangkan usaha itu dari tetangga dan kerabatnya. Semula mereka bekerja di tempat tersebut. Setelah berhasil mengumpulkan modal, mereka berusaha sendiri. Namun demikian, ada pengrajin yang makan asam dan garamnya usaha ini, paling lama adalah 41 tahun, yaitu sekitar tahun 1970-an. Rerata lama waktu usaha adalah 7,5 tahun lamanya. Waktu yang lama ini bukan berarti dijalankan oleh pelaku yang sama, tetapi diturunkan ke anak-anaknya. Ada lima orang pengrajin yang mewarisi usaha orangtuanya. Ada 15 orang (14,6%) pengrajin mengembangkan usaha dengan suami/istrinya. Sebagian besar, yaitu 84

(76,4%) orang, adalah usaha sendiri. Sementara itu, ada pula mengembangkan usaha patungan dengan orang lain (5,5%).

2. Asal Modal dan Tenaga Kerja

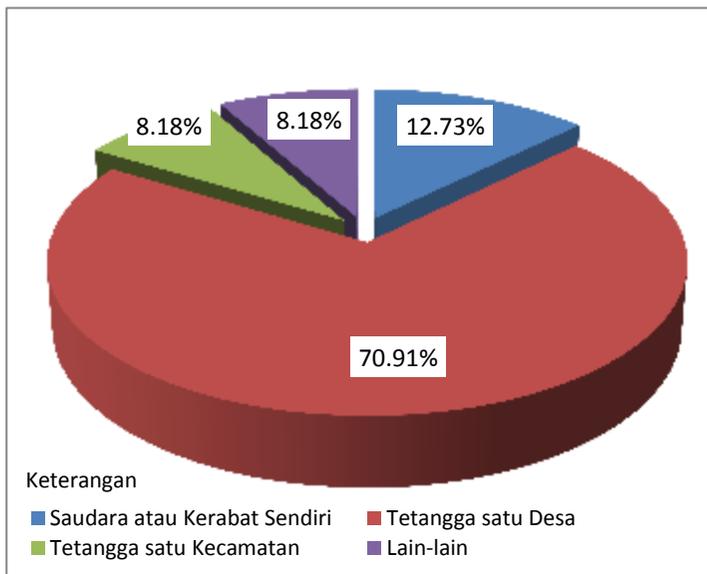
Setiap usaha membutuhkan modal ekonomi. Modal itu bisa berbentuk uang (*fresh money*), lahan dan bangunan maupun alat-alat pabrik. Sebagian besar mereka membangun usahanya dengan uang tabungan dari pekerjaan lain (lihat juga gambar 3.8, bandingkan dengan tabel 3.9). Pilihan lain adalah menggunakan jasa perbankan (16,4%). Hal yang serupa juga dilakukan pada lahan dan bangunan, demikian pula pada alat-alat pabrik. Mereka membeli sendiri dari tabungannya.

Tabel 3.9 Asal Perolehan Modal ekonomi Industri Kecil milik Responden

Asal Perolehan	Modal Awal		Asal Lahan & Bangunan		Alat-alat Pabrik	
	f	%	f	%	f	%
1. Tabungan	77	70,0	98	89,1	107	97,3
2. Pinjaman Kerabat	15	13,6	9	8,2	0	0,0
3. Pinjaman Bank	18	16,4	0	0,0	0	0,0
4. Lain-Lain	0	0,0	3	2,7	3	2,7

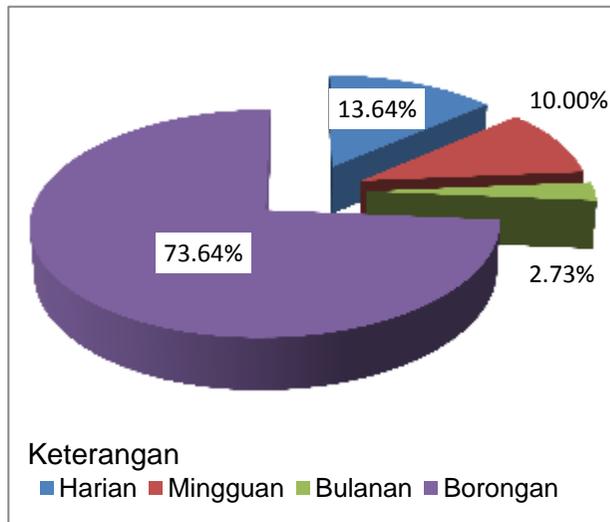
Hal itu dialami oleh Ah (45 tahun). Ia adalah seorang guru. Di sela-sela mengajar, ia aktif di PKK lingkungannya. Ketika ada pelatihan tentang batik, ia mengikutinya. “*Saya senang membatik. Menyalurkan hobi menggambar dan mewarnai waktu kecil... He- he- he- Membatik itu membuat tenang...Tidak kemrungsung...*” Setelah selesai, hasil membatiknya pertama-tama dipakai sendiri ke sekolah. Teman-teman sekantornya sangat suka dan akhirnya mememeskannya. Ia kemudian melihat ada uang tambahan dari pekerjaan

membatik. Ia pun menekuni dengan sungguh-sungguh. Ia menyalurkan dari gajinya dan menabung untuk membeli alat-alat dan seterusnya. Saat ini, ia sudah memiliki sepuluh pekerja membatik. Omzet kini sudah lebih dari gajinya sebagai pegawai negeri.



Gambar 3.10 Asal Tenaga Kerja

Sebagian besar tenaga kerja berasal dari tetangga satu desa, bahkan lebih dari itu satu kampung (satu Dusun atau satu RT). Namun demikian, ada pula yang tetap hanya mengandalkan saudara atau kerabatnya, sedangkan jawaban lain-lain itu ternyata bervariasi, mulai dari campuran antara saudara/ang-gota kerabat dan tetangganya (3 orang) dan dari orang luar kota/kabupaten.



Gambar 3.11 Sistem Pengupahan

Cara mengupah bervariasi. Sebagian besar pengusaha menggunakan sistem borongan. Seorang pekerja diberi target menyelesaikan setiap kain dan dibayar bila telah selesai jadi. Pengusaha membeli kain bahan tersebut. Harganya dipotong dengan bahan-bahan yang diberikan pada pengrajin. Bisa juga, pengrajin membeli bahan baku dari pihak lain, dan kemudian menjual pada pengusaha tersebut. Kelebihannya, pengrajin bisa mengerjakan di rumah sambil menyelesaikan pekerjaan domestiknya. Rata-rata pengrajin adalah ibu rumah tangga dan sejumlah penelitian telah membuktikan bahwa pekerjaan *off-farm* ini mampu memberikan uang tambahan bagi mereka.

Cara lain adalah harian. Hal ini dilakukan apabila pengusaha memiliki “bengkel” atau ruangan sendiri yang dikhususkan untuk mengerjakan membatik (Kab. Bojonegoro) atau menjahit (Kab. Tulungagung). Para pekerjanya mengerjakan

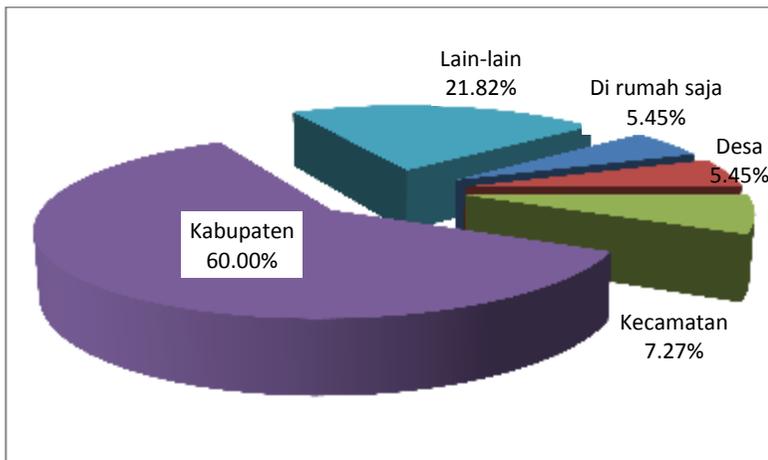
di tempat tersebut dalam waktu tertentu, seperti: orang pabrik-an. Mereka berangkat pagi sekitar jam 7 pagi hingga berakhir 16.00. Istirahat satu jam untuk makan siang dan sholat. Mereka dibayar pada akhir minggu. Ada bonus bila pekerjaannya melebihi target dan ada tunjangan hari raya. Di dalam kondisi yang demikian, pekerja biasanya tidak memiliki peralatan atau modal untuk bisa bermitra dengan pengusaha.

Pada prinsipnya, gaji bulanan dan gaji harian kurang lebih sama. Mereka, pengusaha telah memiliki tempat atau bengkel kerja. Tempat atau bengkel kerja itu setidaknya-tidaknya satu ruangan dengan peralatan kerja, seperti mesin jahit untuk pakaian atau alat batik. Pemilik juga bisa menambahkan kolam untuk mewarnai dan tempat untuk menyeterika, serta ruang terbuka untuk mengeringkan kain. Ketika produksinya telah *ajeg* dan bisa diukur, maka pemilik bisa memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan setiap bulannya. Dengan perkiraan itu, mereka pun lebih memilih menggaji pekerjaannya secara bulanan daripada menggunakan sistem borongan. Ada beberapa kriteria dari pekerja yang digaji bulanan. Pertama, pekerja itu telah bekerja lama di tempat tersebut. Ia tidak memiliki peralatan dan tempat untuk dikerjakan di rumah. Pekerjaan itu sudah menjadi pendapatan utama. Kedua, bila ada pekerja harian lepas, maka mereka yang berkedudukan sebagai *supervisor atau* mandor. Besaran gaji bulanan biasanya mengikuti upah minimum kabupaten.

3. Pemasaran dan Omzet Penjualan

Bengkel atau ruang kerja sebenarnya menjadi multi fungsi bagi pengrajin atau pengusaha batik di Kab. Bojonegoro dan pakaian jadi di Kab. Tulungagung. Selain sebagai tempat kerja, ruangan berfungsi sebagai *showroom*

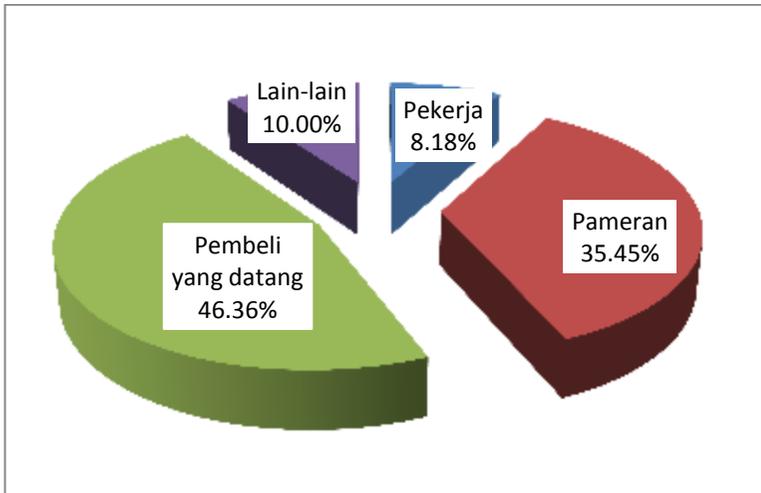
(ruang pameran) dan wisata batik/pakaian. Pengunjung bisa melihat-lihat proses membatik. Mereka juga diijinkan untuk belajar mem-“batik,” mulai menggambar *dasaran* (pola), mewarnai hingga menge-ringkan. Oleh karena itu, dari hasil wawancara, sebagian dari mereka menyebutkan bahwa rumah sudah menjadi tempat pemasaran. DI rumah, mereka juga menawarkan pada tetangga atau kerabat sendiri untuk membeli dan memakainya. Harga yang ditawarkan biasanya harga “bersahabat,” “*sekaligus promosi!*”. Ketika berada di tempat kerja, si pembeli akan me-makainya. Bila orang suka, maka si pemakai akan menunjuk-kan pengrajin mana mereka membelinya, termasuk perkiraan harganya. Tidak jarang, teman-teman itu menitipkan uang untuk membelinya. Wilayah pemasaran yang paling banyak adalah satu kabupaten, meski beberapa sudah dijual di luar propinsi bahkan di luar negeri (lihat gambar 3.12).



Gambar 3.12 Wilayah Pemasaran

Kehadiran pengunjung ini menjadi tenaga pemasaran yang efektif. Hampir separuh dari pengrajin/pengusaha mengakui hal tersebut. Sementara itu, mereka juga mengakui bahwa keterlibatan dalam pameran yang diselenggarakan dalam ber-bagai event sebagai usaha untuk memasarkan produknya. *“Setidak-tidaknya, satu kali dalam setahun. Yang sering waktu peringatan hari jadi kabupaten. Atau, waktu peringatan 17 agustusan (hari kemerdekaan, pen)”*. Di Kabupaten Bojonegoro, setiap peringatan Hari Batik Nasional (2 Oktober) pemkab juga menyelenggarakan pameran. Di hari lain, secara falkultatif, pameran bisa diselenggarakan pada waktu pekan *swadesi* yang dilakukan pada waktu menjelang peringatan hari kebangkitan nasional (20 Mei). Pada saat pekan swadesi dan hari batik nasional, pemkab mewajibkan seluruh aparatur sipil nasional mengenakan pakaian batik. Pada saat itu, tidak jarang pemkab mempromosikan motif batik lokal *Jonegoroan* yang terbaru. Dalam sejarahnya, motif ini pun berkembang karena Tim Penggerak PKK Kabupaten yang didukung oleh istri bupati, **Maffudoh Suyoto pada tahun 2010** menyelenggarakan lomba desain.¹²

¹² <http://www.jonegoroan.com/9-motif-batik-jonegoroan/> diakses tanggal 1 Nopember 2017.



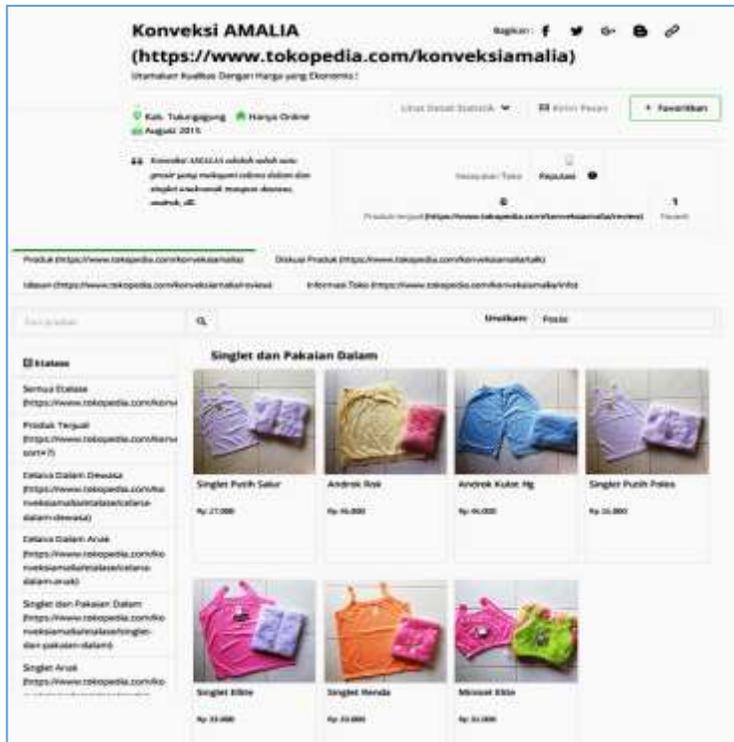
Gambar 3.13 Tenaga Pemasaran

Cara lain adalah dengan memanfaatkan internet. Bila membuka internet, pembaca dapat menulis kata “batik jonegaran” dalam penanda pencari pada google atau mesin pencari lainnya. Setelah ditekan enter, maka layar akan menampilkan situs-situs yang berisi berita dan iklan batik jonegaran. Hal yang serupa juga bisa dilakukan bila mencari pakaian jadi dan batik produk Kab. Tulungagung. Salah satu cara adalah pengusaha atau meminta tolong pada pihak lain untuk membuat situs gratis atau berbayar tentang usaha. Salah satu situs gratis adalah blogger (blogspot). Pengusaha Rizki misalnya membuat situs blog tentang produknya (lihat gambar 3.14).



Gambar 3.14. Blog Pengusaha Batik Bojonegoro tentang Produknya

Saat ini, masyarakat Indonesia telah mengembangkan sejumlah situs toko online, seperti: www.tokopedia.com, www.lazada.co.id, www.kaskus.co.id, dan www.blibli.com, serta www.OLX.com. Dalam catatan pengamat internet, ada sekitar 15 situs toko online yang terkenal. Toko online biasanya menstok barang dan jasa, serta kemudian menawarkan pada para calon pembeli. Pada situsnya, spesifikasi barang dan jasa diberikan secara benar dan lengkap, sehingga meyakinkan para calon pemesan. Pesanan dikirim dengan atau tanpa ongkos kirim ke alamat pembeli.

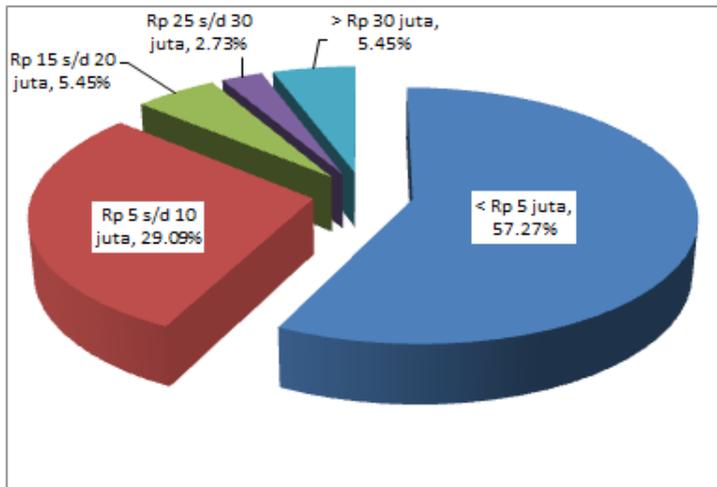


Gambar 3.15 Salah satu konveksi yang menggunakan jasa online

Ada pula, sejumlah situs memberikan alternatif pada para produsen bisa menawarkan barang atau jasanya dengan mendaftar, memberi foto dan seterusnya. Ia membayar pada situs tersebut untuk menampilkan produk dan jasanya. Pengelola situs akan melakukan verifikasi produk dan produsen, dan kemudian menampilkan di dalam situsnya. Komunikasi bisa terjadi di antara pembeli dan penawar, dan transaksi sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari kedua belah pihak, seperti: www.OLX.com dan www.bukalapak.com. Semua meniru dari keberhasilan Amazon. Para produsen pakaian jadi/batik di

Kab. Tulungagung dan batik di Kab. Bojonegoro juga mengembangkan pola pemasaran dengan online.

Dengan berbagai langkah usaha pemasaran ini, para produsen, tepatnya pengrajin dan pengusaha batik dan pakaian jadi di kedua kabupaten juga merasakan hasilnya. Ada 5,45% pengusaha bisa mencapai omzet di atas 30 juta per bulan. Apabila dikalikan 12 bulan untuk satu tahun, maka omzetnya mencapai lebih dari hampir mendekati setengah milyar rupiah. Namun demikian, di tengah-tengah badai arus impor sejak tahun 2010-an, khususnya dari China, sebagian besar masih mengantongi 5 juta rupiah sebulan. Perhitungan ini sudah merupakan rata-rata setiap bulannya. *“Kami, pakaian jadi sebenarnya tidak tentu. Bisa lebih dari 10 juta per bulan kalau pada waktu musim masuk sekolah. Permintaan seragam luar biasa. Sampai nolak-nolak!”* Mereka juga mengakui bulan yang lain mereka tidak begitu banyak menerima order atau pesanan. Secara ajeg, mereka mengatakan, *“Setidak-tidaknya 5 juta ke pegang tangan setiap bulannya.”* Di dalam situasi itu, mereka tidak merumahkan karyawan yang dibayar harian atau borongan. Gambaran ini dapat dilihat dengan jelas pada gambar 3.16.



Gambar 3.16 Besaran Omzet Bersih tiap bulannya

D. Keterlibatan Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah dalam Modal Sosial Usaha Kecil

1. Kebijakan Pemerintah terhadap Industri Kecil

Di dalam kajian ilmu-ilmu ekonomi dan pembangunan, peran pemerintah tidak bisa diabaikan dalam pembangunan masyarakat, khususnya industri kecil. Memang, ada yang masih mempercayai bahwa masyarakat industri tanpa pemerintah masih bisa berkembang. Semangat kewirausahaan yang tinggi diprediksi mampu meningkatkan perekonomian tidak saja di tingkat mikro, tetapi juga makro. Pada Kenyataannya, apabila pemerintah tidak hadir, persaingan antar pengusaha mengakibatkan kejatuhan. Kondisi menjadi sangat sulit para pengusaha harus menghadapi pesaing dari luar. Hal ini yang dialami para pengusaha di Kab. Tulungagung. Ketika krisis moneter, industri onix dan marmer menghadapi persaingan dari luar. Semua pengusaha/pengrajin mengeluh betapa mereka mengalami kesulitan ketika krisis moneter

1998/1999 dan diikuti oleh sejumlah peristiwa terorisme pada tahun 2002-2005. Gangguan keamanan ini berpengaruh pada omzet penjualan ke luar negeri, seperti dialami oleh Rahmat Supriyanto¹³ Akibatnya, sejumlah pengrajin pun bangkrut. Mereka yang masih bertahan itu tidak lepas dari pelanggan lokal.¹⁴

Apabila industri marmer dan onix telah mendunia, maka kondisi menjadi berbeda dengan industri kain, kaos dan pakaian. Industri juga mengalami pasang surut akibat produk dari luar negeri, khususnya dari China dan Hongkong. Pertama, mereka kalah bersaing dari sisi harga. Meski diimpor dari luar negeri, harganya jauh lebih murah. Kedua, kalah dari sisi corak. Mereka tidak jarang mengambil model corak lokal, tetapi seni cetaknya lebih baik. Terkait dengan harga, mereka, pengrajin memang menghadapi dilema. Pertama, upah tenaga kerja yang naik dari tahun ke tahun. Kedua, harga BBM dan Tarif Dasar Listrik juga ikut-ikutan naik. Hal ini menambah komponen harga.

Untuk menghadapi apa yang dialami oleh pengrajin di Kab. Tulungagung, melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah bahu membahu dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemerintah Kab. Tulungagung mencoba membantu pengusaha. Dinas Koperasi dan UMKM mengembangkan sejumlah pelayanan yang ditangani sub bagian. Pembinaan UMKM yang dilaksanakan menyangkut masalah pengembangan kewirausahaan, informasi dan promosi bisnis, serta kerjasama usaha mikro, kecil dan menengah. Untuk

¹³ <https://nusantara.news/marmer-tulungagung-mendunia-tapi-juga-mencekam/1> diakses tanggal 10 Nopember 2017.

¹⁴ <https://economy.okezone.com/read/2012/03/14/450/592719/meraup-omzet-ratusan-juta-dari-bisnis-batu-onyx> diakses tanggal 10 Nopember 2017,

masalah pendanaan UMKM, sedangkan pembinaan dalam hal permodalan melalui bidang Koperasi. UMKM di Kabupaten Tulungagung dilibatkan dalam berbagai aktivitas. Salah satu aktivitasnya adalah menjadi proyek percontohan Kementerian Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk membangun jaringan antar pengusaha melalui PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu). PLUT Tulungagung diresmikan oleh Menteri I Gede Puspayoga. Di dalam PLUT, pemerintah, PT Telkom dan BNI melakukan sinergi dengan membuat pusat layanan, seperti kampung digital dan pasar online.¹⁵ Semua usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk industri tekstil, seperti batik, celana dan pakaian jadi, didaftarkan ke dalam situs layanan terpadu tersebut. Selain itu, melalui situs yang dikembangkan, pelaku usaha dapat mempromosikan produknya. Mereka tidak lagi bergantung pada situs belanja online, seperti: tokopedia dan lazada.

Apa yang dilakukan oleh Pemkab Tulungagung juga dilakukan oleh Pemkab Bojonegoro. Industri batik Bojonegoro ini sebenarnya merupakan rintisan yang relatif baru. Perkembangan motif batik *jonegoroan* dimulai dari lomba desain motif yang diselenggarakan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) yang juga sekaligus pembina PKK Kabupaten Bojonegoro, Ibu Mahfudhoh Suyoto (istri Bupati) pada tahun 2010. Hasilnya, ada 14 motif baru batik *jonegoroan*. Keempat belas motif itu diberi hak paten dan menjadi penciri batik dari bojonegoro.

Peran Dekranasda Kab. Bojonegoro ini juga diperkuat melalui kerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga

¹⁵ <https://www.antaranews.com/berita/600896/menkop-puspayoga-resmikan...>
Diakses tanggal 12 Nopember 2017.

Kerja Kab. Bojonegoro dan Dinas Pariwisata Kab. Bojonegoro. Selain mengadakan lomba desain. Kerjasama ini juga menghasilkan kegiatan lomba *fashion show* untuk memilih duta batik dan duta suara, seperti yang dilakukan pada tanggal 30 Juli 2017.¹⁶ Sementara itu, sejak tahun 2013 Bupati Bojonegoro, Suyoto juga menyediakan toko *Bojonegoro* yang berada di Jalan Gajah Mada, Bojonegoro. Aktivitas ini dilakukan sebagai bentuk kerjasama antara pemkab Bojonegoro, dan LSM Ademos (Asosiasi untuk Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial) yang merupakan lembaga CSR dari Mobil Cepu Limited.¹⁷

2. Bantuan Permodalan hingga Pemasaran sebagai Penguatan Modal Sosial

Sebelum menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean, mereka sebenarnya telah menghadapi ancaman produk impor. Sejak tahun 2010-an, produk pakaian jadi Kab. Tulungagung, khususnya dari Kec. Boyolangu harus bersaing dengan produk dari China. Dari pengakuan salah satu pengrajin, produk pakaian jadi dari China sebenarnya memiliki kualitas yang tidak terlalu luar biasa. Kualitas bisa dilihat dari bahan, jahitan, hingga modelnya. Mereka, produk Kab. Tulungagung, sering-kali dari sisi harga. *“Kalau sudah begini, mau apa lagi...”*

¹⁶ <http://www.bojonegorokab.go.id/berita/baca/2608/Mahfudhoh-Suyoto-Buka-Pemilihan-Duta-batik-Bojonegoro>

¹⁷ <https://jawatimuran.net/2013/12/17/batik-jonegoroan-kabupaten-bojonegoro/tanggal-12-Nopember-2017>.

Jenis Bantuan	Tidak Pernah		Pemerintah		NGO	
	F	%	f	%	f	%
	1. Permodalan	86	78,2	15	13,6	3
2. Produksi	56	50,9	33	30	21	19,1
3. Manajemen	44	40	45	40,9	21	19,1
4. Pengemasan	53	48,2	36	32,7	3	2,7
5. Promosi	47	42,7	42	38,2	21	19,1
6. Pemasaran	44	40	45	40,9	21	19,1
7. Lain-lain	68	61,8	27	24,5	15	13,6

Hal yang sama juga dikemukakan oleh pengrajin atau pelaku usaha batik di Kab. Bojonegoro. Mereka tidak saja harus bersaing dengan produk dari luar negeri, khususnya China, tetapi juga harus bersaing dengan pelaku-pelaku usaha batik di sekitarnya. *“Ketika batik dijadikan ikon nasional. Ketika dijadikan warisan kebudayaan. Semua seperti kedanan batik. Bukan kedanan memakai batik, tetapi juga mbatik. Setiap kabupaten pasti punya batik khas....”* Sementara itu, penikmat batik juga terbatas dan tidak selalu dipakai setiap saat. *“Mereka pengennya murah, tapi baik...”* Kondisi yang demikian menimbulkan persaingan yang cukup ketat. Untuk itu, peran berbagai pihak dibutuhkan untuk memperkuat sektor industri ini. Pemkab Bojonegoro misalnya telah melakukan dengan membantu promosi. Selain telah ditunjukkan di atas, pemkab juga memberikan pakaian seragam batik pada peserta Konferensi Anak Indonesia tahun

2014 di Wisma Makara Univ. Indonesia tanggal 27 Oktober 2014.¹⁸

Dari sisi pemasaran, selain membuka toko atau membuat jaringan pasar online, kedua pemerintah kabupaten mengakui bahwa hal itu sangat penting dan harus didukung. Tindakan paling sederhana, tetapi mengena adalah mengeluarkan kewajiban memakai pakaian batik. Di sekolah dasar hingga menengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bojonegoro dan Kab. Tulungagung telah mewajibkan satu hari dalam enam hari untuk memakai stelan batik. Dengan kebijakan ini, ada beberapa sektor tekstil yang diuntungkan. Pertama, pengrajin atau pelaku usaha kain batik. Kedua, penjahit atau konveksi yang mengolah batik menjadi pakaian jadi. Ketiga, ibu rumah tangga atau penduduk lokal yang ingin memperoleh pekerjaan tambahan (*off-farm*) di luar sektor pokoknya. Ketiga hal ini pada gilirannya menyebabkan perputaran ekonomi di tingkat lokal. Meskipun dalam jumlah prosentase kecil, lembaga non-pemerintah tidak jarang terlibat juga.

Keterlibatan pemkab Bojonegoro dan pemkab Tulungagung juga terlihat pada manajemen. Industri kecil sering lebih merupakan usaha keluarga. Ada beberapa titik kelemahan dari industri ini. Pertama, karena hanya memanfaatkan orang “dalam” yang tidak jarang pengetahuan keuangan terbatas, hal ini berakibat ketidakmampuan mengukur keuntungan dan kerugian. Kedua, mereka sering juga tidak bisa mengukur biaya produksi. Ketiga, karena tidak bisa mengatur orang dengan mengikuti prinsip-prinsip

¹⁸ <http://www.bojonegorokab.go.id/berita/baca/16/Batik-Jonegoroan-Makin-Dikenal-di-Jakarta> diakses tanggal 13 Nopember 2017.

ekonomi, mereka sering gagal memenuhi target yang hendak dicapai. Bila mencermati karakteristik pegawai, sejumlah pengusaha melibatkan orang-orang yang masih satu kerabat. Hubungan kekerabatan ini mempersulit pengusaha bersikap lebih tegas apabila terjadi hal-hal yang merugikan. Mereka cenderung memaklumi, menerima alasan tanpa menyelidiki kebenarannya, dan melakukan pembiaran apabila terjadi berulang-ulang. Melalui pelatihan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) “*stake holder*” terkait, mereka dilatih manajemen, termasuk manajemen personalia. Hasilnya mereka memper-hitungkan apa yang terjadi dan mengusahakan lebih baik. Lembaga usaha atau perusahaannya menjadi organisasi pem-belajar (*learning organizations*).

Hal yang sangat penting adalah masalah permodalan. Semua industri kecil dan menengah selalu bermasalah dalam keuangan. Ada permintaan besar, tetapi karena modal terbatas, maka pesanan pun ditolak. Dengan situasi keuangan nasional yang tidak pasti, harga bahan baku bergerak secara fluktuatif, harganya pun berfluktuasi. Sementara itu, harga jual sering telah disepakati sebelum membeli bahan. Akibatnya, ketika krisis moneter dan serbuan produk asing, mereka pun berguguran satu per satu. Untuk mencegah hal itu meluas, dinas Pemkab di kedua kabupaten telah mengembangkan jaringan dengan pihak perbankan, seperti: BNI dan BRI (lihat tabel 3.10).

BAB IV

MODAL SOSIAL PENGUSAHA INDUSTRI KECIL DI JAWA TIMUR DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN DI ERA MEA

A. Modal Sosial Industri Kecil

Sejumlah teori tentang modal sosial menyebutkan berbagai jenis atau bentuk modal sosial. Ada yang mengatakan bahwa modal sosial merupakan sesuatu yang tidak kasat mata, tetapi dirasakan, mengikat dan mampu menggerakkan para anggota atau warganya untuk melakukan atau menjalankan tujuan tertentu. Contoh dari modal sosial itu adalah rasa kepercayaan (*trust*) dan solidaritas sosial, bahkan norma atau nilai sosial. Ada pula menyatakan bahwa modal sosial bisa dilihat, diukur dan dinyatakan oleh anggota dan pada gilirannya dapat mengikat dan menggerakkan mereka. Modal ini dapat ditunjukkan keterlibatan dalam organisasi sosial dan partisipasi politik. Hal-hal yang demikian direkam dalam penelitian ini.

Apabila tidak dibatasi oleh waktu, penelitian ini menjadi lebih menarik untuk mencermati secara langsung bagaimana modal sosial berperan bagi kelangsungan industri kecil. Peran itu bisa dimulai dari “penggunaan” modal sosial untuk mencari modal ekonomi hingga pemasaran produk. Namun demikian, pertanyaan-pertanyaan yang mendalam dan ditambah dengan kejujuran para pengusaha menjadi pokok dalam memaparkan modal sosialnya.

1. Organisasi Kemasyarakatan Lokal

Dari sembilan organisasi kemasyarakatan yang ditanyakan pada responden berdasarkan instrumen penelitian, tim peneliti menangkap ada 5 (lima) organisasi yang diikuti.

Keempat lainnya, seperti partai politik, lembaga pendidikan dan kesenian, serta lain-lainnya (sebutkan) tidak terjawab oleh responden. Tidak ada yang ikut organisasi partai politik. *“Ini saja sudah sibuk. Buat apa ikut parpol. Yang penting khan ikut coblosan nanti waktu pemilu”*. Sementara itu, responden mengaku bahwa di lembaga pendidikan, tidak ada organisasi yang dibentuk, kecuali ikatan orangtua/wali murid. Keanggotaannya secara otomatis apabila anaknya bersekolah di lembaga tersebut.

Hampir seluruh responden mengaku menjadi anggota dari organisasi keagamaan di tingkat kampung. Mereka tidak saja ikut satu, tetapi dua, yaitu: yasinan dan tahlilan, atau jamiah laki-laki dan perempuan. Kelompok keagamaan itu tidak jarang digunakan untuk mendoakan kelancaran usaha mereka. Di tingkat desa, mereka hanya ikut satu organisasi keagamaan saja, tetapi sebagai partisan, seperti: Nadhatul Ulama (NU) atau Muhammadiyah, atau kelompok doa tahlilan di tingkat desa/ kecamatan. Mereka mengikuti setiap acara, tetapi tidak terdaftar sebagai anggota atau tidak ada keanggotaan yang resmi, kecuali dua organisasi yang disebutkan (NU dan Muhammadiyah). Hanya sedikit yang menjadi pengurus, yaitu tidak lebih dari 5,5% dalam organisasi keagamaan di tingkat kampung, tetapi tidak menjadi pengurus di tingkat kecamatan.

Tabel 4.1. Jumlah Organisasi dan Status Keanggotaan										
Basis Organisasi Masyarakat Lokal	Keagamaan tingkat kampung		Keagamaan desa/kecamatan		Kekerabatan		Pekerjaan		Lingkungan Kampung/Desa	
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
<i>Jumlah Organisasi Yang diikuti (OL02)</i>										
<i>Tidak Menjawab</i>	9	8,2	15	13,6	15	13,6	12	10,9	12	10,9
<i>1</i>	3	2,7	84	76,4	81	73,6	86	78,2	87	79,1
<i>2</i>	86	78,2	3	2,7						
<i>3</i>	6	5,5	8	7,3			3	2,7	3	2,7
<i>Tidak ada</i>	6	5,5			14	12,7	9	8,2	8	7,3
<i>Status dalam Keanggotaan (OL03)</i>										
<i>Tidak Menjawab</i>	9	8,2	15	13,6	18	16,4	15	13,6	18	16,4
<i>Partisan</i>	3	2,7	78	70,9						
<i>Anggota</i>	86	78,2	9	8,2	75	68,2	83	75,5	78	70,9
<i>Pengurus</i>	6	5,5	8	7,3	6	5,5	6	5,5	9	8,2
<i>Tidak Ikut</i>	6	5,5			11	10,0	6	5,5	5	4,5
<i>Kegiatan Rutin dalam satu bulan (OL04)</i>										
<i>Tidak Menjawab</i>	9	8,2	18	16,4	21	19,1	18	16,4	18	16,4
<i>1</i>	75	68,2	75	68,2	75	68,2	83	75,5	81	73,6
<i>2</i>	9	8,2	6	5,5			3	2,7		
<i>3</i>	11	10,0	3	2,7					6	5,5
<i>Tidak ada</i>	6	5,5	8	7,3	14	12,7	6	5,5	5	4,5

Ketika ditanya tentang organisasi kekerabatan atau tepatnya kelompok arisan kekerabatan, sebagian besar mengakui terlibat di dalamnya. Satu keluarga satu kelompok kekerabatan, meskipun bukan merupakan organisasi yang resmi dengan anggaran rumah tangganya. Lebih dari itu, enam orang di antaranya menjadi pengurus kelompok kekerabatan tersebut. Sementara itu, empat belas orang mengaku tidak memiliki kelompok tersebut. Berkumpul bersama-sama pada saat hari raya sudah menjadi kegiatan rutin, tetapi tidak membentuk kelompok secara permanen.

Jawaban keberadaan kelompok yang menaungi responden lebih besar pada kelompok pekerjaan dan kampung/desa. Tiga perempat lebih responden mengaku terlibat dalam satu kelompok di tempat kerja, begitu pula di kampung/desa. Namun demikian, di tempat pekerjaannya, seolah-olah ada keharusan bagi mereka untuk menjadi anggota. Untuk memperkuat keterlibatannya, mereka juga mengadakan pertemuan rutin sekali dalam sebulan. Pertemuan rutin bisa dilakukan pada saat waktu istirahat atau secara bergiliran berkunjung ke rumah anggotanya. Dalam kondisi itu, selain mempererat hubungan, mereka dikenal dengan keluarga dan kondisinya. Selain itu, hal itu juga menguntungkan karena mereka lebih suka terbuka tanpa harus dibebani pikiran. Kalau di tempat kerja, mereka akan dibatasi oleh waktu. *“Juga takut, kalau berbicara yang nggak-nggak tentang pekerjaan, nanti terdengar oleh pimpinan.”*

Hal yang tidak berbeda jauh dengan di kampung atau di desa. Kelompok ibu PKK atau organisasi sejenisnya melakukan pertemuan rutin setiap bulannya. Keanggotaannya sebenarnya bersifat sukarela. Orang boleh ikut di dalamnya atau tidak sama sekali. Oleh karena itu, ada delapan orang mengaku tidak ada organisasi tersebut, tetapi tiga di antaranya ikut organisasi sekampung/sedesa di luar tempat tersebut. Singkat kata, hal itu tidak berarti mereka tidak berinteraksi dengan warga sekampung atau sedesa. *“Di sini, saya ikut orangtua. Yang menjadi anggota ya ibu saya.... Yang ikut arisan ya ibu saya....Saya sendiri masih fokus usaha ini....”* Kira-kira begitu jawaban mereka yang tidak ikut sama sekali organisasi kampung/desa non-keagamaan (lihat tabel 3.10).

Tabel 4.2. Penghimpunan Dana dalam Organisasi Masyarakat Lokal										
Basis Organisasi Masyarakat Lokal	Keagamaan tingkat kampung		Keagamaan desa/kecamatan		Kekerabatan		Pekerjaan		Lingkungan Kampung/Desa	
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
<i>Ada Penghimpunan Dana untuk Hajatan (OL06)</i>										
Tidak Menjawab	12	10,9	18	16,4	18	16,4	15	13,6	21	19,1
Tidak Ada	23	20,9	12	10,9	9	8,2	11	10,0	12	10,9
Ada	72	65,5	75	68,2	75	68,2	78	70,9	72	65,5
Tidak Tahu	3	2,7	5	4,5	8	7,3	6	5,5	5	4,5
<i>Ada Penghimpunan Dana untuk Musibah (OL08)</i>										
Tidak Menjawab	15	13,6	21	19,1	21	19,1	18	16,4	24	21,8
Tidak Ada	9	8,2	3	2,7	6	5,5	5	4,5	9	8,2
Tidak Tahu	3	2,7	5	4,5	8	7,3	6	5,5	2	1,8
<i>Ada Penghimpunan Dana Rutin (OL09)</i>										
Tidak Menjawab	21	19,1	21	19,1	21	19,1	21	19,1	18	16,4
Tidak Ada	83	75,5	3	2,7	75	68,2	77	70,0	84	76,4
Ada	3	2,7	81	73,6	6	5,5	6	5,5	6	5,5
Tidak Tahu	3	2,7	5	4,5	8	7,3	6	5,5	2	1,8
<i>Pernah Meminjam Dana Rutin (OL10)</i>										
Tidak Menjawab	21	19,1	21	19,1	21	19,1	21	19,1	21	19,1
Tidak Ada	89	80,9	89	80,9	83	75,5	86	78,2	86	78,2
Ada					3	2,7	3	2,7	3	2,7
Tidak Tahu					3	2,7				

Tabel 4.2 menunjukkan keterlibatan masing-masing organisasi dalam menghimpun dana. Data ini dihasilkan dengan menanyakan pada setiap responden tentang penghimpunan dana mulai dari saat salah satu anggotanya mengadakan hajatan, atau terkena musibah hingga iuran rutin setiap bulan. Di organisasi keagamaan tingkat kampung misalnya, tarikan sum-bangan lebih banyak pada saat terkena musibah daripada me-lakukan hajatan. Hal terkait dengan prinsip pada masyarakat Indonesia, teman, sahabat atau saudara sejati bukan pada saat senang, tetapi pada saat susah. Hajatan apapun, seperti:

sunatan dan pernikahan, di dalam konstruk orang Jawa sebagai aktivitas *mangayubahagia* (turut bersuka-cita). Hal ini berbeda dengan musibah, apalagi kematian. Mereka harus *nderek bela sungkawa* (turut ikut bersedih). Oleh karena itu, dengan pemahaman ini ada keharusan moral (*moral obligation*) bagi masyarakat Jawa (Tulungagung dan Bojonegoro) turut menyumbang untuk meringankan mereka yang terkena musibah. Selain itu, mereka juga tidak mengambil dari iuran rutin, karena memang tidak ada iuran rutin setiap bulannya. Hal yang serupa juga dilakukan pada kelompok keagamaan di tingkat kampung/desa, kelompok kekerabatan, pekerjaan dan kelompok non keagamaan kampung/desa.

Terkait dengan penghimpunan dana rutin atau iuran rutin, hanya ada enam responden yang menjawab ada di dalam kelompok-kelompok tersebut, khususnya kelompok kekerabatan, pekerjaan dan organisasi atau kelompok non-keagamaan di tingkat kampung atau desa. Selebihnya, saat diwawancara secara mendalam (*depth interview*) mereka yang menjawab tidak mengakui bahwa ada penghimpunan dana, tetapi hanya merupakan arisan yang akan kembali ke anggotanya. Setiap pertemuan bulanan, mereka membayar uang arisan dan ditambah sedikit uang konsumsi. Uang konsumsi diberikan untuk membantu tuan rumah. Meskipun demikian, dengan uang konsumsi itu tuan rumah sebenarnya tetap saja harus mengeluarkan biaya tambahan yang lebih besar jumlah. “Selain kewajiban, malu dan sudah menjadi kewajiban memuliakan tamu, mas!” Mereka malu kalau tidak bisa memberikan konsumsi yang memuaskan bagi tamunya. Mereka senang bila karena konsumsi tamunya senang.

Mereka tidak mengenal iuran wajib, seperti pada ketiga orang yang menjawab ya.

Dari keenam orang itu, hanya tiga orang yang memanfaatkan atau meminjam dana tersebut di ketiga kelompok tersebut. Ketiga orang belum tentu responden yang sama pada masing-masing kelompok. Di dalam pertanyaan berikutnya, ketiga orang itu lebih mengaku bahwa pinjaman semata-mata digunakan untuk hajatan (perkawinan). Setelah acara, mereka segera mengembalikan pinjaman tersebut baik dengan cara mengangsur rutin setiap bulan atau membayar lunas.

2. Intensitas Hubungan Sosial

Intensitas hubungan sosial ini merupakan modal sosial yang bersifat *bonding* atau mengikat antar anggota di dalam suatu komunitas. Hal ini menjadi sangat penting ketika memperhatikan bahwa pengrajin berada di dalam suatu komunitas, baik satu Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), atau se-Kampung (dusun) dan satu desa. Rukun Tetangga merupakan kelompok masyarakat yang terkecil, sekitar 50 s/d 100 KK (Kepala Keluarga), sementara Rukun Warga dibentuk dari sejumlah rukun tetangga. Kampung (dusun) merupakan satu wilayah terkecil di Jawa, seperti Huta pada masyarakat Batak atau Gampong pada masyarakat Aceh. Pada masyarakat Jawa, kata dusun lebih digunakan di wilayah perdesaan, sedangkan istilah kampung lebih merujuk pada permukiman alamiah di wilayah perkotaan. Pada masa pemerintahan Suharto dan era sebelumnya, permukiman kampung merupakan tempat hunian orang urban yang bervariasi dalam berbagai aspek kehidupan yang khas. Karena kemiskinan dan keterbatasan lainnya, kampung lebih terkesan kumuh. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, kesan itu lambat

laun dikikis dengan program perbaikan kampung (*Kampong Improvement Programme*) dengan dana Bank Dunia.

RT dan RW dalam sejarahnya sebenarnya merupakan bentukan dari pemerintah kolonial Jepang. Dalam usahanya memenangkan peperangan Asia Timur Raya (Perang Dunia ke 2 wilayah Pasifik), pemerintah kolonial Jepang mengadopsi pola pengaturan administratif dari tempat asalnya. Salah satunya adalah pembentukan RT dan RW. Pembentukan ini sebagai usaha untuk memudahkan rekrutmen tenaga kerja untuk perang. Pada wilayah kerajaan-kerajaan Islam Jawa, seperti Yogyakarta dan Surakarta, sebenarnya telah ada konsep *penyatus* dan *penewu* sebagai pengelola tenaga kerja bakti untuk keperluan kerajaan atau bersama. Dalam konsep Jawa ini, seseorang tidak harus membayar pajak pada kerajaan karena telah menggantikannya dengan tenaganya untuk kerja wajib. Jabatan *penewu* ini setingkat dengan *asisten wedana* atau camat sekarang. Ia membawahi 1.000 orang tenaga kerja, *penyatus* adalah struktur di bawah dengan menangani 100 tenaga kerja, Selain *penewu* dan *penyatus*, ada pula *paneket* (50 orang) dan *panalawe* (25 orang). Hal ini hanya berlaku pada wilayah-wilayah kerajaan di Jawa pada masa kolonial Belanda. Oleh karena terbatas pada wilayah tertentu, nampaknya pemerintah kolonial Jepang menerapkan polanya untuk berlaku di seluruh Indonesia.

Tabel 4.3. Intensitas Hubungan Sosial

Situasi	Sangat Kurang		Kurang		Cukup		Tinggi		Sangat Tinggi	
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
Pengenalan	15	13,6					92	83,6	3	2,7
Intensitas Pertemuan	12	10,9			6	5,5	5	4,5	87	79,1
Sikap ketika bertemu	12	10,9	3	2,7			11	10,0	84	76,4
Bila berpergian, rumah dititipkan ke....	107	97,3							3	2,7
Bila ada masalah keluarga, berdiskusi dengan.....	101	91,8			3	2,7	3	2,7	3	2,7

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa mereka mengenal setiap warga masyarakat mulai dari kerabat terdekat, RT hingga desa dengan baik. Memang, sekitar 10% lebih kurang mengenal anggota masyarakat lainnya karena berbagai faktor. Salah satunya adalah status mereka yang masih baru atau sebagai pendatang di tempat tersebut. Intensitas pertemuan pun juga sangat tinggi. Setiap hari bertemu, apalagi mereka bekerja di rumah (*home industry*). Sambil bekerja, mereka juga menunggu pelanggan (lihat gambar 3.13). Di dalam pertemuan tersebut, mereka tidak saja saling menyapa, tetapi juga bercakap-cakap tentang berbagai hal, mulai dari keadaan keluarga hingga usaha dan hal-hal lain terkait dengan usaha tersebut.

Namun demikian, pada masalah-masalah yang sensitif mereka juga tidak bisa melibatkan orang lain, apalagi jauh dari tempat tinggalnya. Bila ada kegiatan luar kota, mereka bisa menitipkan ke tetangganya. Tidak setiap tetangga, mereka hanya mempercayai tetangga yang paling dekat

dengan rumah dan hubungan sosialnya sangat dekat. Ada istilah masyarakat Jawa, “*Tetangga merupakan saudara yang paling dekat...*” Prinsip ini digunakan untuk menghadapi masalah-masalah yang bersifat pribadi. Masalah-masalah pribadi pun terbatas. Mereka membedakan masalah yang bisa minta pertolongan atau nasihat dengan tetangga atau orang terdekat, atau harus dengan orang lain yang sudah menjadi bidang pekerjaannya.

3. *Ikatan Sosial dan Reprisitas*

Di dalam teori ilmu-ilmu Sosial, salah satunya menyebutkan bahwa setiap orang selalu tergabung dalam satu atau dua kelompok sosialnya. Sebagai anggota komunitas, mereka memiliki ikatan yang kuat antar anggotanya. Ikatan sosial ini diawali dengan hubungan atau interaksi sosial antar anggota. Mereka saling mengenal antara satu dan lainnya, berkomunikasi dan seterusnya (lihat tabel 3.12), hingga merasa terikat satu sama lain.

Kegiatan	Kelahiran		Upacara Pernikahan		Pemakaman		Mendirikan rumah		Mengerjakan sawah		Tahlilan/Yasinan	
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
Tidak Pernah Datang	6	5,5	6	5,5	9	8,2	9	8,2	101	91,8	23	20,9
Datang kosong	63	57,3	6	5,5	11	10,0	11	10,0	3	2,7	3	2,7
Tenaga	24	21,8	69	62,7	78	70,9	78	70,9			15	13,6
Barang	3	2,7	3	2,7	9	8,2	9	8,2	6	5,5	63	57,3
Uang	8	7,3	15	13,6	3	2,7	3	2,7			3	2,7
Dua dari tenaga, barang & uang	6	5,4	11	10,0							3	2,7

Ikatan sosial ini nampak pada saat warga lain memiliki aktivitas di luar kesehariannya. Salah satu di antaranya adalah hajatan dan musibah. Sebagaimana budaya masyarakat di dunia, mereka melakukan perayaan mengikuti lingkaran hidup (*life cycle*), mulai dari waktu ibu hamil, melahirkan, inisiasi dewasa (suntat atau sejenisnya), perkawinan hingga meninggal. Peristiwa positif disebut dengan hajatan, sedangkan peristiwa negatif disebut musibah. Peristiwa positif yang dimaksud adalah peristiwa yang menyenangkan tidak saja keluarganya, tetapi masyarakat sekitarnya. Di dalam peristiwa ini, keluarga memperoleh kesenangan karena bertambah anggota baru, atau proses pendewasaan (peralihan dari situasi anak-anak menjadi remaja atau dewasa), hingga penambahan anggota baru karena perkawinan. Sementara itu, kata “musibah” menunjukkan pada situasi keluarga yang kehilangan atau sakit pada anggota keluarganya. Hal ini diartikan sebagai situasi kehilangan. Dengan sikap religiusitas, situasi kehilangan ini dinilai “cobaan” dari ilahi (Sang Khalik).

Pada saat kelahiran, menurut pengakuan responden, mereka mengusahakan selalu hadir. Mereka datang awal kali dengan tangan kosong. Bagi responden, ucapan selamat orangtua atau kerabat yang memperoleh anak itu lebih penting. Lebih dari itu, bila ada kesempatan membantu orang melahirkan, maka dengan segera mereka akan melakukannya. “*Kalau ini urusan nyawa...!*” singkat kata mengapa mereka bersedia mengerahkan tenaga lebih dahulu, baru uang atau barang kemudian. Hal yang sama dilakukan pada hajatan perkawinan. Sebelum, pada saat hari H dan sesudahnya, mereka bekerja bersama tuan rumah untuk mempersiapkan

hingga mengelat dan pada akhirnya membereskan sisa-sisa kegiatan. Para ibu-ibu membantu pemilik rumah mulai dari memasak hingga penerima dan melayani konsumsi (*laden*) tamu undangan.

Di dua acara hajatan tersebut, responden mengaku melakukan repositas (*timbang balik*). Menurut pengakuan salah satu responden, apabila memiliki hajatan (*duwe gawe*), maka tuan rumah akan mencatat nama para tamunya dan apa yang mereka berikan. Catatan tidak boleh dihilangkan sampai akhir hajatnya. Apabila tamu tersebut mengundang untuk menghadiri hajatannya, maka responden akan melihat catatannya dan mengembalikan minimal sebesar apa yang telah diberikan kepadanya. Dengan catatan, mereka juga memperhatikan nilai atau barang pada saat ini (*inflasi*). Dengan demikian, tidak mungkin tuan rumah menerima uang atau barang yang tidak sesuai nilainya. Lebih dari itu, ketika merencanakan hajatan, seseorang bisa juga meminta batuan, berupa uang atau barang. Mereka akan membayarnya kelak ketika orang yang dipinjami itu memiliki hajatan.

Penggunaan tenaga juga sebagai bentuk dukungan terhadap keluarga yang mengalami musibah. Mereka, responden berusaha hadir. Mereka membantu apa saja, mulai dari meminjam *terop*, menyiapkan kursi hingga memandikan jenazah dan mengantar ke makam. Di dalam konteks agama (Islam), bila ada yang menangan, sebenarnya aktivitas ini bukan sebagai keharusan. Namun demikian, mereka merasa bahwa menolong di saat duka jauh lebih penting dibandingkan pada waktu senang (hajatan). Oleh karena itu, tabel 5.5 menunjukkan prosentase yang tinggi pada tenaga di saat pemakaman.

Hal yang serupa pada saat tahlil/yasinan. Acara itu dilakukan biasanya untuk mendoakan orang yang telah meninggal (arwah). Setelah musibah (pemakaman), menurut tradisi Jawa, mereka akan mendoakan mulai dari 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun (*mendhak siji*¹⁹), 2 tahun (*mendhak loro*²⁰) dan 1000 hari (*nyewu* atau *nguwis-uwisi*). Di beberapa wilayah, tahlil atau yasinan ini menjadi kegiatan rutin dari jamiah (kelompok doa) ibu-ibu/bapak-bapak se-RT atau RW. Tujuannya sama, yaitu mendoakan para leluhur. Di dalam kondisi-kondisi yang demikian, mereka tidak sepenuhnya membutuhkan tenaga. Orang-orang membantu dengan memberi bahan-bahan makanan, seperti: mie, beras, gula dan kopi. Bahan-bahan itu diolah untuk konsumsi pada saat acara tersebut. Acara biasanya dilakukan sesudah tengah hari (*bakda dhuhur*²¹) atau sesudah jam tujuh malam (*bakda isya*²²). Apabila menjadi tetangga terdekat atau kerabat, maka res-ponden membantu tenaga memasak atau apapun, bahkan seka-ligus memberikan uang atau barang.

Pada masyarakat Jawa, ada istilah terkait dengan gotong royong, yaitu: *sambatan*. Kata dasar *sambatan* adalah *sambat* yang berarti mengeluh meminta tolong. Hal itu disampaikan pada warga sekitar ketika ada hajatan yang tidak bisa diker-

¹⁹ *Mendhak siji* artinya sesudah satu tahun, terhitung dari hari kematian. Ukuran waktu berdasarkan hitungan hari dan weton Jawa (Islam). Apabila meninggal pada hari Jum'at Pon bulan Syawal tanggal 12. Peringatan dilakukan sebelum hari Jum'at Pon bulan Syawal tanggal 12 tahun depan.

²⁰ *Mendhak loro* artinya sesudah dua tahun Jawa (Islam).

²¹ *Bakda dhuhur* artinya sesudah waktu dhuhur. Dhuhur adalah waktu doa umat Islam sekitar pukul 12 siang.

²² *Bakda dhuhur* artinya sesudah waktu isya.' Isya' adalah waktu doa umat Islam sekitar pukul 18.30 malam.

jakan sendiri atau mengandalkan kerabat sendiri. Pekerjaan itu tidak bisa digolongkan musibah. Kalau musibah, orang pasti akan datang karena merupakan bagian dari kewajiban moral (*moral obligation*). Pekerjaan yang dijadikan *sambatan* adalah mendirikan rumah dan mengerjakan sawah. Tidak seluruh tahap mendirikan rumah, pekerjaannya adalah pada saat mendirikan kerangka atap (*ngadeg kuda-kuda*). Pada saat itu, sama seperti pada waktu membuat pondasi, setelah selesai, pemilik rumah mengadakan ritual adat *ngadeg kuda-kuda*. Upacara berisi doa berisi harapan dan ucapan terima kasih kepada Tuhan dan orang-orang yang membantu. Selanjutnya, pemilik mengajak makan bersama. Hal yang serupa pada saat mengerjakan sawah, terutama pada saat tanam padi. Karena daerah penelitian merupakan masyarakat yang telah bergeser ke non-pertanian, maka sebagian besar menyatakan tidak pernah.

4. *Rasa Aman*

Tindak kejahatan merupakan ancaman terhadap rasa aman. Rasa aman ini sangat penting dalam mengembangkan usaha. Ketidakadaan rasa aman akan berakibat usaha apapun terganggu. Orang tidak berani bekerja di luar rumah dengan nyaman. Mereka selalu dihindangi rasa kuatir dan was-was. Bagi mereka, percuma bekerja menghasilkan rezeki kalau nyawa taruhannya. Oleh karena itu, sejumlah ahli ilmu-ilmu sosial memasukkan rasa aman sebagai bagian dari modal sosial. Namun demikian, indikator yang digunakan adalah berapa prosentase kejadian tindak kejahatan pada masyarakat. Data cukup diperoleh dari pihak kepolisian.

Tindakan	Kejadian						Total	
	<i>1.a-d</i>	<i>1.e-f</i>	<i>1.g</i>	<i>1.h</i>	<i>1.i-j</i>	<i>1.k-o</i>	f	%
Diam	6	3	0	3	3	0	15	31,25
Langsung Menolong	9	0	0	3	0	3	15	31,25
Minta bantuan tetangga/orang lain	0	3	3	0	0	0	6	12,50
Melapor polisi	3	0	3	0	3	3	12	25,00
Total	18	6	6	6	6	6	48	100,00

Data ini memang tidak sepenuhnya mewakili kejadian tindak kejahatan di dalam masyarakat. Dari pertanyaan yang diajukan pada responden, dengan jawaban lebih dari satu, hanya 48 orang mengaku pernah melihat dan/atau mengalami. Dalam pengertian, setiap responden ditanya apakah pernah melihat dan/atau mengalami satu per satu jenis tindak kejahatan, mulai dari “penipuan,” “pencurian” dan seterusnya hingga “kenakalan remaja.” Dengan cara demikian, ada kemungkinan responden yang sama melihat dan/atau mengalami beberapa tindak kejahatan. Kalau demikian adanya, maka wilayah tersebut memiliki resiko gangguan “kejahatan” lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya.

Pada saat kejadian, seperti yang disampaikan, tidak semua responden melapor ke pihak berwajib, kepolisian, hanya 25% saja. Hal itu bergantung pada tindak kejahatan, terutama menyangkut nyawa orang. Tindak kejahatan lain yang dilaporkan ke polisi adalah perjudian, pelecehan seksual, pemer-kosaan dan narkoba. Selebihnya, mereka memilih diam atau menolong korban. Tindakan diam dilakukan ketika kejadian berlangsung dengan cepat dan/atau tidak menjadi

korban. Responden hanya menjadi saksi peristiwa saja. Ketika ditanya polisi, mereka akan menjawab, tetapi tidak melaporkan peristiwa.

5. *Partisipasi Politik*

Partisipasi politik dianggap penting sebagai bagian dari modal sosial. Lebih dari itu, Daniel Lerner dan Samuel Huntington menekankan peran partisipasi politik dalam pembangunan masyarakat. Melalui partisipasi politik, seorang individu akan terlibat dalam memutuskan suatu perkara yang terkait dengan kemajuan masyarakat. Gagasan-gagasannya akan tersampaikan dan diimplementasikan oleh pengambil kebijakan.

Di tingkat lokal, partisipasi politik yang kasat mata dapat dilihat dan menjadi indikator adalah keterlibatan individu dalam rapat RT/RW hingga bahasan khusus tentang pembangunan di tingkat kabupaten/kota. Dari jawaban pertanyaan tentang keterlibatan di tingkat RT, sebagian besar responden sangat antusias hadir dan ikut serta memberikan sumbangsaran. Namun tidak demikian, ketika di RT/RW atau lingkungan yang lebih luas membahas tentang masalah-masalah pembangunan dan keamanan. Mereka menyadari bahwa hal-hal tersebut telah menjadi tugas dan peran bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya. Mereka tidak memiliki kewenangan itu membahas kedua masalah tersebut. Lebih dari itu, ketika dilakukan kerja bakti dan menjaga keamanan pun, mereka juga memilih untuk menyerahkan pada pihak-pihak yang seharusnya terlibat. Bila kerja bakti membangun jalan atau sesuatu, mereka lebih suka menyumbangkan uang agar bisa digunakan untuk memanggil tukang dan mengerjakannya. *“Kalau memang sudah menjadi pekerjaan*

orang, kenapa harus kerja bakti. Pertama, itu berarti ambil rezeki orang. Kedua, hasil kita kerjakan belum tentu baik. Kita khan bukan ahlinya.

Situasi	Sangat Kurang		Kurang		Cukup		Tinggi		Sangat Tinggi	
	f	%	F	%	f	%	f	%	f	%
Pemilihan RT	12	10,9					9	8,2	89	80,9
Rapat Masalah Pembangunan	21	19,1			71	64,5	9	8,2	9	8,2
Rapat Masalah Keamanan	23	20,9			69	62,7	6	5,5	12	10,9
Kerjabakti	21	19,1	75	68,2	5	4,5	6	5,5	3	2,7
Siskamling^{*)}	27	24,5	74	67,3	6	5,5			3	2,7

Keterangan

^{*)} Sistem Keamanan Lingkungan (Ronda Malam)

BAB V

HAMBATAN DALAM PENGEMBANGAN MODAL SOSIAL

Walaupun secara intern modal sosial yang dimiliki oleh para pengusaha industri kecil cukup baik terbukti dengan kuatnya ikatan sosial (*bonding*) diantara para pengrajin, namun demikian masih menghadapi hambatan. Hambatan yang dihadapi dalam mengembangkan modal sosial pengusaha industri kecil antara lain, adalah belum maksimalnya modal sosial '*bridging*' dan '*linking*' yaitu modal sosial yang menjembatani antara kelompok pengusaha satu dengan pihak lain, misalnya industri besar, lembaga sosial masyarakat, perbankan dan para *stake holder* lainnya. Hal ini diperlukan untuk lebih mengembangkan usaha yang telah ada melalui peningkatan akses terhadap modal, perluasan jaringan pemasaran, peningkatan manajemen usaha serta peningkatan ketrampilan teknik.

Sosial bonding, berupa kultur nilai, kultur, persepsi dan tradisi dan adat istiadat, Modal Sosial dengan karakteristik ikatan yang kuat dalam suatu sistem kemasyarakatan dimana masih berlakunya sistem kekerabatan dengan sistem klen yang mewujudkan rasa simpati, berkewajiban, percaya resiprositas dan pengakuan timbal balik nilai kebudayaan yang dipercaya. Tradisi merupakan tata kelakuan yang kekal serta memiliki integrasi kuat dengan pola perilaku masyarakat mempunyai kekuatan mengikat dengan beban sangsi bagi pelanggarnya.

Sosial bridging, berupa institusi maupun mekanisme yang merupakan ikatan sosial yang timbul sebagai reaksi atas berbagai macam karakteristik kelompoknya. Stephen Aldidgre menggambar-kannya sebagai pelumas sosial yaitu pelancar roda-roda penghambat jalannya modal sosial dalam sebuah komunitas

dengan wilayah kerja lebih luas daripada sosial bounding, bisa bekerja lintas kelompok etnis maupun kelompok kepentingan. Dapat dilihat pula adanya keterlibatan umum sebagai warga negara, asosiasi, dan jaringan.

Sosial linking, berupa hubungan/jaringan sosial dengan adanya hubungan diantara beberapa level dari kekuatan sosial maupun status sosial yang ada dalam masyarakat.

Dari paparan definitive sampai pada ranah kongkret dari modal sosial, perlu adanya penegasan bahwa ciri penting modal sosial sebagai sebuah kapital dibandingkan dengan kapital lainnya adalah asal usulnya yang bersifat sosial, yaitu relasi sosial dianggap sinergi atau kompetisi dimana kemenangan seseorang hanya dapat dicap di atas kekalahan orang lain. Karenanya komponen modal sosial dapat dilihat dalam tiga level yaitu level nilai, institusi, dan mekanisme. Ketiga level modal sosial di atas memberi pengertian bahwa modal sosial dapat memberi kontribusi bagi terjadinya integrasi sosial sekaligus mengatasi konflik dalam masyarakat.

BAB VI

MODEL KEBIJAKAN YANG PEMERINTAH DAERAH UNTUK PENGEMBANGAN MODAL SOSIAL

A. Membangun Peta Jalan (*Road Map*) Penguatan Modal Sosial Usaha Kecil

Dari analisis lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa sejumlah modal sosial ternyata tidak sepenuhnya mendukung usaha. Modal sosial ternyata tidak memiliki korelasi positif secara signifikan dengan omzet penjualan. Modal sosial merupakan variabel gabungan (*compounding* variabel) dari partisipasi politik, repositas dan solidaritas sosial. Ketika dicermati lebih dalam, maka hanya partisipasi politik (SCapPart) yang tidak memiliki korelasi yang signifikan. Sementara itu, solidaritas sosial menunjukkan korelasi negatif yang signifikan. Artinya, semakin tinggi solidaritas sosial (SCapSS), semakin rendah omzetnya, demikian pula sebaliknya. Dengan memperhatikan penjelasan ini, solidaritas sosial berposisi sebagai modal sosial yang bersifat mengikat ke dalam (*bonding*). Sebaliknya, repositas menjadi pendukung terhadap modal sosial. Semakin tinggi repositasnya, maka semakin tinggi pula keuntungannya. Singkat kata, kalau dalam peribahasa Jawa, “*wong kuwi ngunduhi wohing pakertine dhewe.*” Kalau dia bertindak baik dengan orang lain, maka akan diuntungkan pada masa selanjutnya (lihat tabel 6.1).

Tabel 6.1. Matriks Korelasi antara Omzet dan Modal Sosial

		Omzet	SCapPart	SCapRep	SCapSS
Omzet	Pearson Correlation	1	,077	,253**	-,280**
	Sig. (2-tailed)		,421	,008	,003
	N	110	110	110	110
SCapPart	Pearson Correlation	,077	1	-,056	,664**
	Sig. (2-tailed)	,421		,563	,000
	N	110	110	110	110
SCapRep	Pearson Correlation	,253**	-,056	1	-,021
	Sig. (2-tailed)	,008	,563		,827
	N	110	110	110	110
SCapSS	Pearson Correlation	-,280**	,664**	-,021	1
	Sig. (2-tailed)	,003	,000	,827	
	N	110	110	110	110

Analisis data yang lain menunjukkan bahwa jumlah organisasi di bidang pekerjaannya turut menyumbang secara signifikan omzet yang diperoleh. Melalui analisis anova dan perbandingan rata-rata, penelitian ini menunjukkan bahwa mereka yang memiliki keanggotaan lebih dari satu organisasi di bidang pekerjaannya memiliki omzet yang lebih secara rata-rata. Perbedaan ini sangat signifikan. Singkat kata, seorang pengusaha ingin berhasil, maka harus terlibat dalam sejumlah organisasi yang terkait dengan usahanya. Meskipun demikian, bila mencermati analisis anova pada tabel 6.2, maka keuntungan atau omzet besar baru diperoleh bila menjadi anggota 3 (tiga) organisasi pekerjaan (profesi).

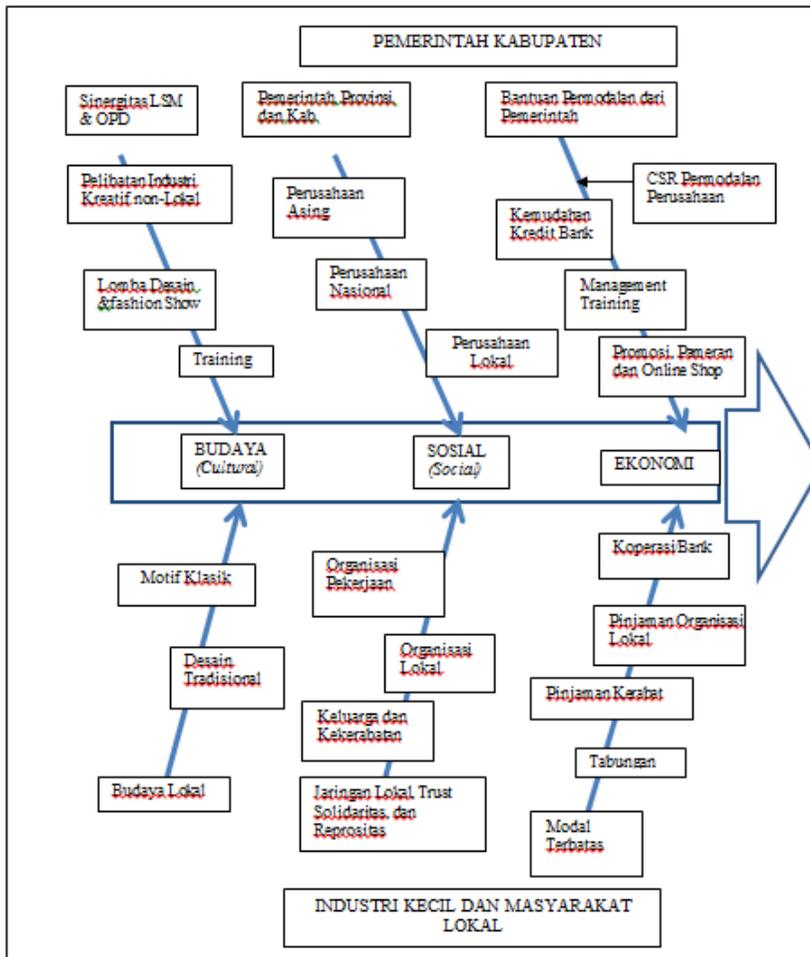
Tabel 6.2. Analisis Anova Perbedaan Omzet berdasarkan Keanggotaan Organisasi Pekerja

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	3059620613107820,000	2	1529810306553910,000	16,935	,000
Within Groups	9665718023255810,000	107	90333813301456,200		
Total	12725338636363600,000	109			

Tukey HSD dengan Dependent Variable: Omzet

Groups (I)	Groups (J)	Mean Difference (I-J)	Sig.	Std. Error	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
,0	2,0	8544573,643*	,002	2463521,537	2689354,57	14399792,72
	3,0	-11583333,333*	,030	4480421,937	-22232256,67	-934409,99
2,0	,0	-8544573,643*	,002	2463521,537	-14399792,72	-2689354,57
	3,0	-20127906,977*	,000	4013231,706	-29666427,54	-10589386,41
3,0	,0	11583333,333*	,030	4480421,937	934409,99	22232256,67
	2,0	20127906,977*	,000	4013231,706	10589386,41	29666427,54

Dengan analisis statistik ini, ada sejumlah tindakan yang dapat dilakukan untuk memperkuat modal sosial sekaligus menegaskan peran pemerintah di dalamnya. *Langkah pertama*, karena batik dan pakaian jadi merupakan produk kreatifitas, maka pelatihan tentang kreatifitas menjadi kata kunci dalam usaha ini. Pengusaha harus memiliki kemampuan untuk kreatif atau pemda mengembangkan jejaring yang mampu mendukung kreasi batik dan pakaian jadi, seperti yang telah dilakukan oleh Dekranasda dan Pemkab Bojonegoro. Hal ini bisa dilakukan dengan menggali *lokal wisdom*. Dalam perspektif teori Pierre Bourdieu, kreasi merupakan modal budaya dari masyarakat lokal.



Gambar 6.1. Road-Map Pengembangan Industri Kecil

Langkah kedua, penguatan permodalan. Pengusaha batik dan pakaian jadi sering terkendala oleh permodalan. Pengembangan jejaring dengan dunia perbankan dan dukungan perusahaan non-Batik dan non-Pakaian jadi dalam kerangka CSR (*Cooporate Social Responsibility*) menjadi dukungan yang tidak

kalah penting, sebagaimana dilakukan oleh Pemkab Tulungagung dan Pemkab Bojonegoro. Namun demikian, para pengusaha harus memahami manajemen resiko atas keputusan yang diambilnya.

Langkah ketiga, melakukan penguatan manajemen pada pengrajin atau pengusaha. Di dalam penguatan itu, pengrajin dan/atau pengusaha memperoleh pengetahuan dan kemampuan analisis SWOT terkait dengan MEA dan pesaing lainnya. Kemampuan melakukan introspeksi atas kelemahan dan mengembangkan strategi untuk mengatasi menjadi kata kunci menghadapi persaingan di era MEA. Selain itu, pengusaha juga harus memahami dan melakukan manajemen resiko atas apa yang telah dan akan dilakukan.

Langkah keempat, melakukan transformasi modal sosial solidaritas sosial yang tidak saja sebagai *bonding* di antara mereka, tetapi menjadi *bridging* dan *linking* terkait dengan usahanya. Kesadaran ini seharusnya ada pada jejaring sosial yang dibangun oleh pengusaha. Di dalam kasus di kedua kabupaten, solidaritas memang telah menguatkan relasi di antara mereka. Mereka tidak menjadi pesaing, tetapi membantu dalam membangun relasi pemasaran. Hal itu sebenarnya seiring dengan data yang menunjukkan bahwa sebagian besar pengusaha menggunakan jaringan kekerabatan untuk pemasaran.

Langkah kelima, bila mencermati resiprositas (hubungan timbal balik) sebagai modal sosial yang menguntungkan atau meningkatkan omzet, maka pengusaha dapat menggunakan hal tersebut dalam berbagai aspek produksi dan pemasaran. Spesifikasi usaha pada masing-masing pengusaha bisa dikembangkan dan saling mengisi satu sama lain, sehingga tidak terjadi persaingan. Perbedaan motif pada batik atau jenis

pakaian jadi bisa memperkuat relasi dan sekaligus bertukar pelanggan karena memiliki jenis produk yang berbeda. Apa yang dilakukan oleh Bupati Bojonegoro merupakan salah satu untuk memperkuat relasi tersebut.

Langkah terakhir, penguatan dan penambahan jaringan profesi (pekerjaan). Mengingat hasil olah data, jumlah organisasi akan membantu wilayah pemasaran produk. Pembentukan asosiasi yang didukung oleh Pemkab menjadi kata kunci tidak saja mencari pasar, tetapi juga penyamaan harga hingga pemasaran, serta bahan baku. Selama ini, seperti Pemkab Bojonegoro dan Tulungagung, kepala daerah dan kepala dinas terlibat dalam membantu pemasaran para pengusaha.

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembinaan industri kecil khususnya industri kecil batik di kabupaten Bojonegoro dan industri kecil pakaian jadi dan batik di kabupaten Tulungagung tidak hanya memajukan secara kasat mata, tetapi juga yang tidak kasat mata yaitu modal sosial. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai investasi, omset, jumlah tenaga kerja serta perkembangan luasan pemasaran, tetapi juga membawa perkembangan dalam hal yang tidak bisa diukur secara fisik seperti meningkatnya kreativitas, tingkat kepercayaan (*trust*), intensitas sosial dan repositas antar pengusaha.
2. Dalam menghadapi persaingan di era Masyarakat Ekonomi Asia (MEA), ternyata para pengusaha industri kecil telah menunjukkan perkembangan yang berarti dalam hal kreativitas, dengan seringkali mengikuti lomba desain dan kegiatan pameran. Selain itu pengembangan modal sosial dengan pembentukan asosiasi pengusaha menjadi wadah untuk saling mengisi kekurangan anggotanya dalam hal modal dan pemasaran. Wadah ini juga menimbulkan *trust* antar peng-usaha yang dapat mengurangi persaingan.
3. Walaupun secara intern modal sosial yang dimiliki oleh para pengusaha induutri kecil cukup baik terbukti dengan kuatnya ikatan sosial (*bonding*) diantara para pengrajin, namun demikian masih menghadapi hambatan. Hambatan yang dihadapi dalam mengembangkan modal sosial pengusaha industri kecil antara lain, adalah belum maksimalnya modal sosial '*brid-*

ging' dan *'linking*' yaitu modal sosial yang menjembatani antara kelompok pengusaha satu dengan pihak lain, misalnya industri besar, lembaga sosial masyarakat, perbankan dan para *stake holder* lainnya. Hal ini diperlukan untuk lebih mengembangkan usaha yang telah ada melalui peningkatan akses terhadap modal, perluasan jaringan pemasaran, pening-katan manajemen usaha serta peningkatan ketrampilan tek-nik.

4. Pengembangan modal sosial industri kecil, tidak terlepas dari bentuk modal yang lain yaitu modal budaya dan modal ekonomi yang saling terkait. Kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat dilihat pada Gambar 5.13. *Pertama*, Pemerintah daerah melalui OPD dan Lembaga Sosial Masyarakat serta industri kreatif non lokal bisa bersinergi dalam melaksanakan pelatihan, lomba desain dan *fashion show* mengembangkan motif klasik dan desain tradisional berdasarkan *local wisdom*. *Kedua*, modal sosial (*bridging*) harus dikembangkan melalui peningkatan hubungan dan akses dari pengusaha industri kecil dengan pemerintah dan perusahaan asing, perusahaan nasional maupun lokal. Hubungan ini dapat meningkatkan akses pengusaha industri kecil terhadap modal, ketrampilan dan pemasaran. Sementara ke dalam organisasi pengusaha industri kecil (*bonding*) harus meningkatkan intensitas hubungan sosial, solidaritas, repositas dan *trust* di dalam organisasi di perusahaan itu sendiri, serta terhadap organisasi lokal dan kekerabatan. Hal ini diperlukan karena terjadi rasa aman, terhindar dari konflik dan persaingan sehingga meningkatkan produk-tivitas usaha. *Ketiga*, permodalan yang dimiliki oleh peng-usaha industri kecil berasal dari

tabungan sendiri, pinjaman dari kerabat, organisasi lokal, koperasi dan bank. Peningkatan modal yang sudah ada tersebut dapat dilakukan melalui bantuan permodalan dari pemerintah maupun bantuan CSR. Apabila modal ini dibarengi pelatihan di bidang pengelolaannya, serta keikutsertaan dalam pameran dan promosi dagang, maka terjadi peningkatan modal ekonomi.

B. Rekomendasi

1. Untuk meningkatkan kreatifitas dan sekaligus sebagai ajang promosi, perlu diselenggarakannya lomba desain batik dan *fashion show* secara berkala dan berkesinambungan oleh OPD terkait, bersama Dekranasda dan *Stake holder* lainnya di kabupaten Bojonegoro dan kabupaten Tulungagung
2. Untuk meningkatkan permodalan, OPD terkait dapat memfasilitasi para pengusaha industri kecil batik dan pakaian jadi untuk mendapatkan bantuan dana sebagai pinjaman maupun hibah. OPD terkait antara lain Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Bojonegoro dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tulungagung, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro, Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Tulungagung, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja kabupaten Bojonegoro serta OPD lainnya.
3. Untuk meningkatkan kemampuan manajemen bagi pengusaha industri kecil, OPD terkait dapat melaksanakan pelatihan pengelolaan usaha dalam bidang keuangan, pemasaran, kewirausahaan. Hal ini penting karena usaha yang dikelola

secara efektif dan efisien akan bisa bertahan bahkan berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat di era MEA.

4. Untuk mengetahui perkembangan usaha industri kecil, Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Tulungagung dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja kabupaten Bojonegoro dapat melaksanakan pendataan/*updating* data semua industri kecil yang ada, baik industri kecil formal maupun non formal serta sentra industri kecil. Hal ini perlu secara rutin dilaksanakan mengingat dinamisnya dunia usaha.
5. OPD terkait secara rutin mengadakan pertemuan dengan kelompok binaan untuk memantau serta mengetahui hambatan yang terjadi dalam kelompok dalam mengembangkan usahanya. Dengan adanya pertemuan secara berkala dengan jadwal yang telah disepakati, maka terjadi intensitas dan solidaritas antar pengusaha. Pertemuan juga sebagai ajang untuk bertukar informasi tentang berbagai hal berkaitan dengan peluang pemasaran, model terbaru yang sedang diminati pasar, informasi sumber bahan baku dan penolong yang lebih murah, akses terhadap permodalan dan sebagainya.
6. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro, Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Tulungagung, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja kabupaten Bojonegoro bisa merencanakan kegiatan untuk membantu para pengusaha memasarkan bisnisnya secara *online* atau *e-commerce*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrafiq, Atep. 2014. Menakar Pengaruh Masyarakat Ekonomi Asean 2015 Terhadap Pembangunan Indonesia. *Journal of Economic*. 2014. Jakarta
- Association of Southeast Asian Nation. 2008. *Asean Economic Community Blueprint*. Jakarta. Asean Secretariat.
- Bourdieu P, 1986. "The production of belief: contribution to an economy of symbolic goods", in Collins, R., Curran J., Garnham, N., Scannell, P., Schlesinger, P. and Sparks, C. (Eds).
- Burt RS, 1992. *Structural holes. The social structure of competition*. Harvard University Press, Cambridge. Massachusetts.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro, 2016. *Kabupaten Bojonegoro Dalam Angka 2016*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2016. *Kabupaten Tulungagung Dalam Angka 2016*.
- Coleman, J.,1990, "Social capital and the common good", *American Journal of Sociology*, Vol. 94, pp. S95-S120.
- Depperindag RI, 2002, *Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, 2002 – 2004, Buku 1 Kebijakan dan Strategi Umum Pengembangan Industri Kecil dan Menengah* Hal 45.
- Dinas Koperasi dan UMKM, 2014. *Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur*.
- Fukuyama F, 1995. *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. Free Press.

- Granovetter, M.S., 1973. *The Strength of Weak Ties*. American Journal of Sociology, 78 No.6 pp, 1361-81
- Grootaert, C. (1998) *Social Capital: The Missing Link?* Social Capital Initiative Working Paper No. 3. The World Bank. Social Development Family, Environmentally and Socially Sustainable Development Network.
- Lin, Nan. 2001. *Social Capital, A Theory of Social Structure and Action*. Cambridge University Press. New York.
- Putnam, RD (1993), "The masyarakat sejahtera: modal sosial dan kehidupan publik", Amerika Prospect, Vol. 4 No 13, hlm 35-42.
- Seibert, Kraimer, dan Liden, 2001, *Organizational Culture and Leadership*, Second Edition, CA San Fransisco: Jossey-Bass
- Rinawati, Septa. H. 2009. pengaruh kebijakan pemerintah terhadap jiwa kewirausahaan dan peningkatan pendapatan industri kecil di kabupaten Tulung Agung. Laporan Penelitian. Balitbang Jawa Timur 2016
- Xiaping R, 2004. Factors for Succes in Small Manufacturing Firms. *Journal of Small Business Management*, 26 (1) : 51-58.
- Sutojo S, Achmad H, 1994. Sumber Daya Manusia Berkualitas Mengubah Visi menjadi Realitas. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Tambunan T, 1999. Perkembangan Industri Skala kecil di Indonesia. Cetakan Pertama, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Wangke, H. 2014. Peluang Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi Asean 2015. Info Singkat Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi. Sekretariat Jendral DPR RI.

TENTANG PENULIS



Dr. Ir. Herrukmi Septa Rinawati, MM. Lahir di Tuban, 27 September 1961 adalah peneliti Manajemen Sumber Daya Manusia pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur. Doktor Pengembangan SDM Lulusan Universitas Airlangga Surabaya dengan fokus disertasi pada Pengembangan

SDM ini menempuh pendidikan mulai dari S1 Teknologi Pangan dan Gizi, Institut Pertanian Bogor (1984), Magister (S2) Manajemen Konsentrasi Sumber Daya Manusia, Universitas Merdeka Malang (2000), dan S3 Pengembangan SDM Universitas Airlangga Surabaya (2014). **Penelitian yang dilakukan lima tahun terakhir adalah:** Kompetensi Kualitas SDM Guru SMA Negeri dan SMK Negeri di Kota Kediri; Studi Kelayakan Pemekaran Wilayah Kecamatan Kota Kediri; Kompetensi Kualitas SDM Guru SMP Negeri di Kota Kediri; Kompetensi Kualitas SDM Guru SMA Negeri dan SMK Negeri Kota Mojokerto; Kompetensi Kualitas SDM Guru SMA Negeri di Kota Probolinggo; **Rencana Pengembangan Industri Kecil di Kota Probolinggo;** Partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap Pembangunan di Kota Probolinggo; Rencana Induk Pengembangan Pendidikan di Kota Probolinggo; Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelestarian Hutan Mangrove di Kota Probolinggo; Etos Kerja Masyarakat Pendalungan di Probolinggo; Efisiensi Beban Tugas Kelembagaan Setelah Implementasi PP 41 tahun 2007 di Jawa Timur; Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Kinerja Usaha Kecil Menengah (Studi Kasus di Kota Probolinggo); Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ling-

kungan di Kota Mojokerto; Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan di Kabupaten Pamekasan; Implementasi Pola Rekrutmen Terhadap Kompetensi PNS Pengadaan Umum dan Ex Honorer Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Timur; Penelitian Penataan Stren Kali Jagir di Kota Surabaya; Penelitian Hubungan Timbal Balik Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintaah Provinsi Jawa Timur; Kajian Kebijakan Perpanjangan Usia Pensiun Bagi Eselon II di Jawa Timur; Kajian Pengarus Utamaan Gender di Jawa Timur; Kajian Kebijakan Implementasi Jaminan Persalinan Bagi Masyarakat di Jawa Timur; Kajian Pemberdayaan Organisasi Lokal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan di Jawa Timur; Kajian Tentang Implementasi BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan BOPDA (Bantuan Operasional Barang Daerah) di Jawa Timur; Kajian Peningkatan Peran Kepala desa dalam Peningkatan Persalinan Aman Yang Menggunakan Jampersal dalam rangka Penurunan AKI dan AKB di Jawa Timur; Kajian Efektifitas Peran dan Fungsi SKPD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang; Kajian Kebijakan Pemerintah Sektor Pertanian Sebagai Unsur Pilihan dalam Menunjang Ketahanan pangan di Jawa Timur; Kajian Kebijakan Impor Kedele dalam rangka Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat di Jawa Timur; Evaluasi Struktur Organisasi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo; Evaluasi Struktur Organisasi Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo; Evaluasi Struktur Organisasi Kantor dan Rumah Sakit Umum di Lingkungan Pemerintah Kabu-paten Probolinggo; Kajian Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Terhadap 5 (Lima) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Probolinggo; Pelaksanaan Good Governance di Kabupaten Sidoarjo; Kajian Fngsi Kelitbangan dalam Rangka

Penguatan Kantor Peneliti-an dan Pengembangan di Daerah di Kabupaten Lamongan; Masalah Pengangguran di Kota Malang dan upaya Pemecahnya; Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Otonomi Daerah; kajian Implementasi Kebijakan Peralihan Askes ke BPJS terhadap Kinerja Lembaga Pelayanan Kesehatan di Jawa Timur; Penerapan ISOO-9000 di Perusahaan Industri di Jawa Timur; Pedoman Penanggulangan Bencana Untuk Masyarakat Jawa Timur yang Tinggal di Daerah Rawan Banjir; The Effects of Social Net-working, Education, and Self-Efficacy on Entrepreneurship and Subjective Well-Being: A Case Study on Small Scae Embroidery Industries in Probolinggo; Pengembangan Ekowisata Pantai Bangsring Banyuwangi; Modal Sosial dan Subjective Well Being (SWB) Penghuni Rumah Susun (Studi di Rusunawa Jambangan Surabaya); Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Jiwa Kewira-usahaan dan Peningkatan Pendapatan Pengrajin dalam Rangka Pe-ngentasan Kemiskinan; Model Pengembangan Modal Sosial industri Kecil dalam Rangka Menghadapi Persaingan di Era MEA; Indeks Minat Baca di Kota Probolinggo; Pengembangan Model Kemitraan UMKM dengan Industri Skala Sedang dan Besar di Jawa Timur.

